



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2029



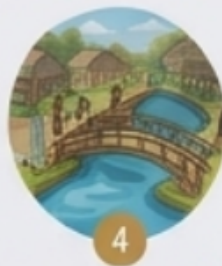
1
LPJU
TENAGA SURYA



2
JALAN
LINGKUNGAN



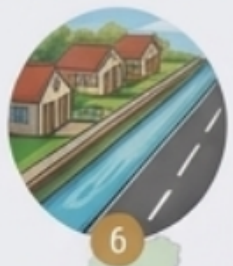
3
PENGOLAHAN
AIR LIMBAH



4
JEMBATAN
KAYU



5
PENGOLAHAN
AIR BERSIH



6
DRAINASE



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat: Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong

KATA PENGANTAR

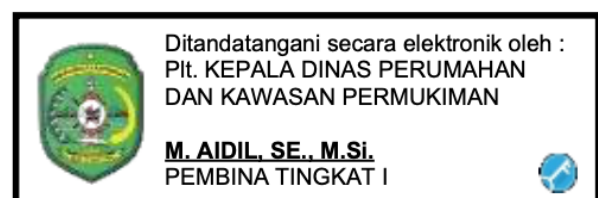
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini merupakan wujud implementasi atas ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dokumen ini disusun guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, dengan menitikberatkan pada peran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, air minum, dan sanitasi.

Renstra ini dimaksudkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Penyusunannya dilakukan secara terarah dan sistematis, berbasis pada data dan informasi yang akurat, mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan daerah, serta melibatkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait. Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, dan sasaran kinerja yang dirancang untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, tertata, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi kontribusi nyata Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung tata kelola pembangunan daerah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kini dan masa depan.

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2026



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	68
2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan.....	80
2.1.4 Mitra perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	81
2.1.5 Dukungan BUMD dan Stakeholder lainnya dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....	83
2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	83
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	86
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	86
2.2.2 Isu Strategis	95
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	104
3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029.....	104
3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029.....	105
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029.....	109
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029	112
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	117

4.1 Uraian Program Perangkat Daerah	118
4.2 Uraian Kegiatan Perangkat Daerah.....	127
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	279
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah	372
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	384
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	386
BAB 5 PENUTUP	390

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	25
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kepangkatan Tahun 2024	26
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024..	27
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2024	28
Tabel 2.5 Data Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2024	30
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.....	69
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	76
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	96
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	106
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	109
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	113
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	128
Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	280
Tabel 4.4 Daftar Program Prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	372
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	384
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	388

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.....	24
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	116

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025–2029 pada tanggal 23 Juni 2025 menjadi tonggak awal dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah yang baru. Momen ini menandai dimulainya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih selama lima tahun ke depan.

Secara simultan, perangkat daerah juga mulai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sebagai penjabaran teknis dari RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra PD harus dilakukan segera setelah pelantikan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 272, mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah selama periode lima tahun.

Sejalan dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun RPJMD segera setelah pelantikan Kepala Daerah. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan mempercepat pelaksanaan program prioritas sesuai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan RPJMD dan Renstra secara bersamaan bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan sinkronisasi antara arah kebijakan daerah dengan pelaksanaan teknis oleh perangkat daerah. Hal ini penting untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan

pembangunan daerah, serta untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Instruksi ini juga menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah, termasuk indikator pembangunan nasional dan prioritas strategis daerah. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan internal, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil, serta memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen Renstra yang responsif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara komprehensif.

Dalam dokumen resmi Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah didefinisikan sebagai:

“Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada RPJMD.”

Renstra menjadi bagian dari sistem dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokrenda) yang wajib disusun setelah RPJMD ditetapkan, dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan serta pengukuran kinerja perangkat daerah.

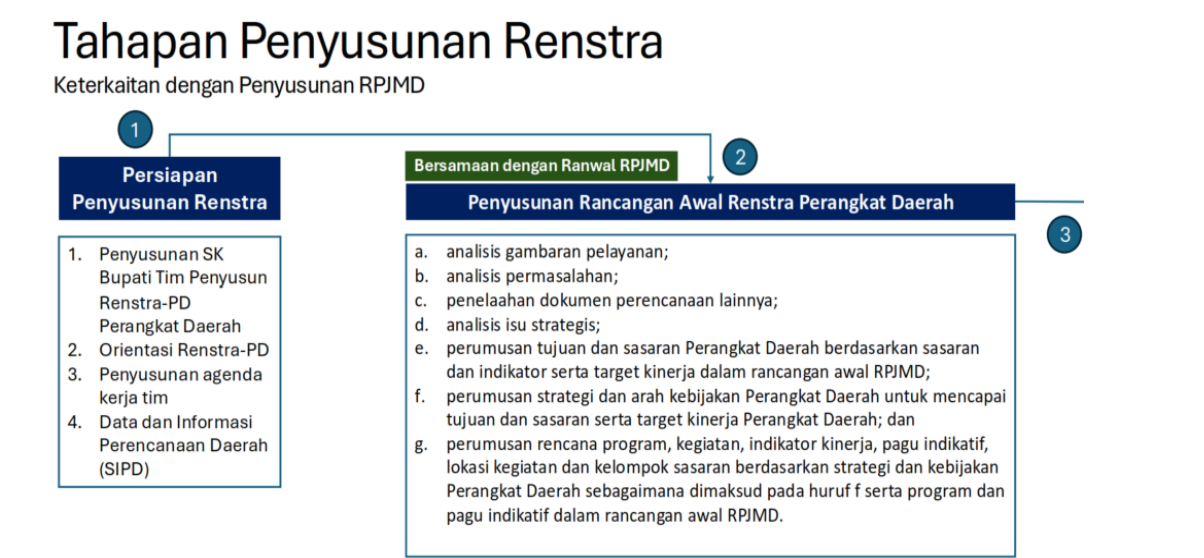
Adapun Fungsi dan Kedudukan Renstra PD dalam dokumen perencanaan Daerah :

- Sebagai penjabaran teknis RPJMD: Renstra menerjemahkan arah kebijakan RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- Sebagai acuan Renja tahunan: Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.
- Sebagai alat evaluasi kinerja: Renstra memuat indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan.

Terdapat beberapa perubahan penting dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025. Instruksi ini membawa sejumlah pembaruan dibandingkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, antara lain:

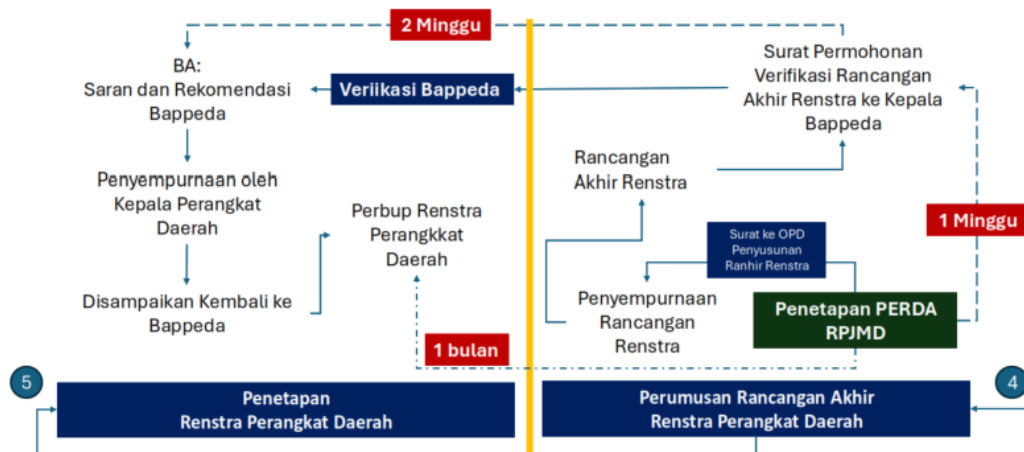
- Penyesuaian struktur bab dalam dokumen Renstra.
- Penambahan proyeksi hingga tahun 2030 untuk mengakomodasi masa transisi kepala daerah.
- Penekanan pada keterpaduan antara RPJMD, Renstra, dan RKPD.

Tahapan-tahapan penyusunan Renstra PD dimulai dari proses Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Tahapan Penyusunan Renstra

Keterkaitan dengan Penyusunan RPJMD



Pada bagan diatas terlihat tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mulai dari proses persiapan sampai kepada penetapan renstra Perangkat Daerah. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati dilakukan paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perda RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
8. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 No. 163)
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 Nomor 180 , Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 90);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan baik urusan Pekerjaan Umum maupun urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini adalah:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 5 (lima) tahun kedepan;
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran;
5. Menyediakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif;
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Dasar Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Subbab Gambaran Pelayanan PD paling sedikit memuat :

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
2. Sumber daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Ada 2 (dua) Tabel yang harus disajikan. Sumber data tabel dapat dari LKjIP (LAKIP) OPD dari 5 (lima) tahun sebelumnya :

- Tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (Tabel T-C.23/versi PMDN No.86/2017).

Setelah penyajian Tabel, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan sebelumnya.

- Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.24/versi PMDN No.86/2017).

Meng-interpretasi data Tabel di atas, sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

4. Kelompok Sasaran Layanan

Penjelasan atas Layanan yang diberikan oleh OPD yang bersangkutan, sebagai kelompok sasaran seperti layanan adalah individu, kelompok masyarakat, atau pihak yang menjadi penerima manfaat utama dari program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah

5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan

permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

- Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Defenisi : adalah "gap" atau kesenjangan antara kondisi ideal yang ingin dicapai dengan kondisi faktual yang ada saat ini. Permasalahan ini bersifat spesifik dan dapat diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah

- Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD

Definisi : Tujuan RENSTRA adalah rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;

Penjelasan :

- Merupakan arah pembangunan jangka menengah sektoral PD.
- Bersifat strategis, fokus, dan relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- Tujuan diturunkan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis sektor terkait;

2. Sasaran Renstra PD

Definisi Sasaran RENSTRA adalah hasil spesifik yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh perangkat daerah, yang merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan

Penjelasan :

- Harus SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

- Diikuti dengan indikator kinerja sasaran dan target kinerjanya per tahun.
- Digunakan sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3. Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/Sub Kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Definisi : Strategi adalah pendekatan atau cara utama yang akan ditempuh oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Penjelasan :

- Disusun berdasarkan analisis SWOT atau kajian permasalahan dan potensi.
- Menggambarkan langkah-langkah kebijakan yang sinergis dan integratif.
- Bisa berupa intervensi program, perubahan sistem pelayanan, sinergi antar sektor.

4. Arah Kebijakan PD Dalam Mencapai Tujuan

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Definisi :

Arah kebijakan adalah pilihan kebijakan sektoral/subsektoral yang akan diambil perangkat daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan.

Penjelasan :

- Lebih teknis daripada strategi, namun tetap bersifat umum.

- Menjadi dasar dalam penentuan prioritas program dan kegiatan di RKPD.
- Harus menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output; Program, kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya; Daftar program, kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030 yang memuat :

1. Uraian Program

Definisi :

Program adalah kumpulan kegiatan yang saling terkait dan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan

Penjelasan :

- Menggambarkan upaya strategis perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA.
- Ditentukan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintah.
- Merujuk pada struktur program nasional/SIPD RI

2. Uraian Kegiatan

Definisi :

Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri atas satu atau beberapa Sub Kegiatan, dilaksanakan untuk mencapai keluaran (output) tertentu

Penjelasan :

- Kegiatan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator program.
- Dapat bersifat operasional (misalnya pengelolaan data, pelatihan, pelaksanaan teknis, dan lain-lain)

3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Definisi :

Sub Kegiatan adalah unit terkecil dari rencana pembangunan yang mendeskripsikan langkah operasional teknis, termasuk target kinerja yang terukur, indikator, dan kebutuhan anggarannya

Penjelasan :

Indikator Kinerja : Ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Sub Kegiatan.

Target : Nilai atau capaian yang direncanakan dalam satu tahun atau periode.

Pagu Indikatif : Proyeksi alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan selama satu atau lebih tahun.

4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Definisi :

Merupakan Sub Kegiatan yang secara eksplisit mendukung pencapaian target prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD

Penjelasan :

- Ditandai sebagai flagship atau prioritas strategis perangkat daerah.
- Biasanya disesuaikan dengan program unggulan kepala daerah atau urusan wajib pelayanan dasar.

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PD

Definisi :

IKU adalah indikator yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam RENSTRA

Penjelasan :

- Mengukur hasil akhir (outcome) dari pelaksanaan program secara agregat.
- Digunakan dalam evaluasi kinerja jangka menengah perangkat daerah.
- IKU terintegrasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).

Definisi :

IKI adalah indikator teknis untuk mengukur pencapaian kinerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan

Penjelasan :

- Digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan urusan berdasarkan Perda
- Pembentukan PD.

- Lebih rinci dan teknis dibandingkan IKU.
- Menjadi referensi dalam penyusunan PK (Perjanjian Kinerja) Kepala PD

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

1. Kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian, serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan urusan pemerintah daerah

Definisi :

Kaidah pelaksanaan dan pengendalian adalah pedoman atau prinsip pelaksanaan rencana yang tertuang dalam RENSTRA, serta mekanisme pengendalian dan penjaminan kualitas implementasinya

Evaluasi adalah penilaian atas pelaksanaan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah, berdasarkan hasil capaian periode sebelumnya serta implikasi kebijakan terhadap perencanaan ke depan

Penjelasan :

- Menjelaskan prinsip-prinsip koordinasi internal PD dan antar PD.
- Mencantumkan mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pelacakan kemajuan kinerja.
- Menyesuaikan dengan sistem pengendalian internal dan SAKIP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dinas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertipe A, menyelenggarakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas membantu Bupati Kutai Kartanegara melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi pokok:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan Permukiman;
 - b. pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan Permukiman;
 - c. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan Permukiman;
 - d. penyusunan laporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan Permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Sekretariat, meliputi:
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Perumahan, meliputi :
4. Bidang Kawasan Permukiman, meliputi :
5. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
6. Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas Mengkoordinasikan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- b. merumuskan dan Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. merumuskan dan Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- g. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta Mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris memiliki fungsi :

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d. mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - 1) administrasi umum perangkat Daerah;
 - 2) pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 3) penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 4) pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 5) administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 6) perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
 - 8) administrasi keuangan Perangkat Daerah.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset Perangkat Daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

3. Kepala Bidang Perumahan

Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi

pelaksanaan urusan Pendataan dan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.

Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Pendataan dan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perumahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pendataan dan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perumahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Pendataan dan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perumahan;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - 2) sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - 3) pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - 4) pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - 5) pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus; dan
 - 6) penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Perumahan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Pendataan dan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perumahan;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas, serta Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas, serta Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas, serta Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan

- Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas, serta Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
 - e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
 - 2) peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; dan
 - 3) pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota.
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Kawasan Permukiman yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas, serta Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

5. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi

Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan, dan Pengembangan SPAM.

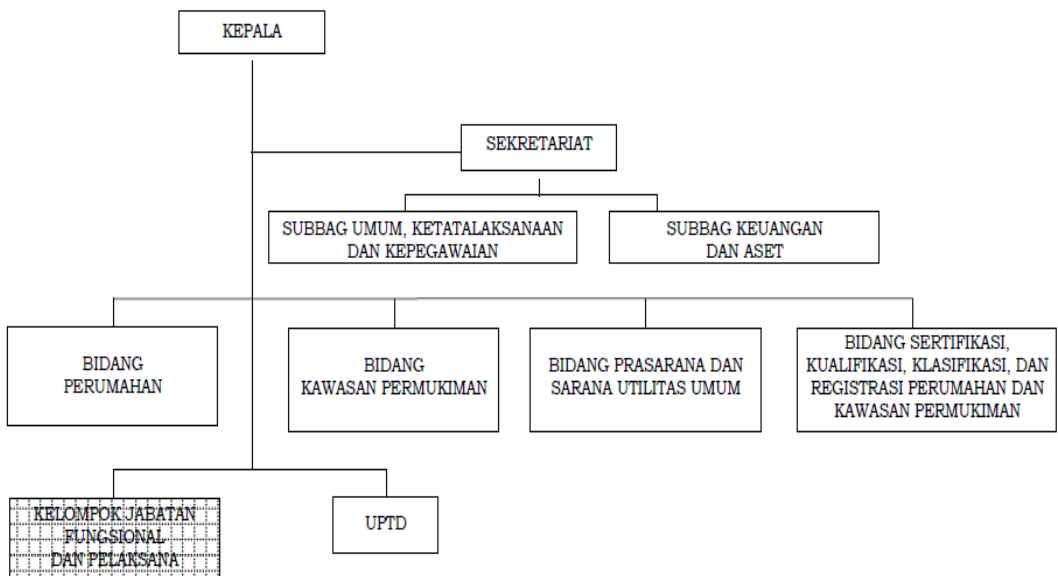
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, yaitu:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan, dan Pengembangan SPAM;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan, dan Pengembangan SPAM;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan, dan Pengembangan SPAM;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - 1) urusan penyelenggaraan PSU Perumahan;
 - 2) pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil

- pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan
- g. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan, dan Pengembangan SPAM;
 - i. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
6. Kepala Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kepala Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Kepala Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi, yaitu:
- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim

- manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 - 2) penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB); dan
 - 3) sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, bagan gambar struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara mutlak diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Golongan Ruang dan Kelas Jabatan

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 190 orang. Adapun jumlah dan komposisi ASN dan PPPK seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Golongan/ Kelas	Pegawai		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1	I	-	-	-	
2	II	27	30	57	
3	III	39	43	82	
4	IV	6	6	12	
5	IX	12	12	24	
6	VII	4	1	5	
7	V	4	5	9	
8	I	1	0	1	
JUMLAH		93	97	190	

Pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 93 pria dan 97 wanita dengan dominasi pegawai di Golongan III sebanyak 82 orang.

2. Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kepangkatan
- Berikut adalah jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kepangkatan Tahun 2025

No	Pangkat	Gol. Ruang	Pegawai		Jumlah	Keterangan
			Pria	Wanita		
I	Juru Muda	I/a	-	-	-	
	Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-	
	Juru	I/b	-	-	-	
	Juru Tk.I	I/b	-	-	-	
II	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	
	Pengatur	II/c	5	4	9	
	Pengatur Tk.I	II/d	22	26	48	
III	Penata Muda	III/a	9	14	23	
	Penata Muda Tk.I	III/b	5	5	10	
	Penata	III/c	6	4	10	
	Penata Tk.I	III/d	19	20	39	
IV	Pembina	IV/a	4	6	10	
	Pembina Tk.I	IV/b	2	0	2	

No	Pangkat	Gol. Ruang	Pegawai		Jumlah	Keterangan
			Pria	Wanita		
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	
	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	
	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	
V	Kelas IX	III/a	12	12	24	
	Kelas VII	II/c	4	1	5	
	Kelas V	II/a	4	5	9	
	Kelas I	I/d	1	0	1	
	JUMLAH		93	97	190	

Menurut kepangkatan, Aparatur Sipil Negara di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi pangkat Penata Tk. I atau III/d sebanyak 39 orang.

3. Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Tingkat Pendidikan
- Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan S1
- Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Pegawai		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1	S.3	-	-	-	
2	S.2	6	9	15	
3	S1	48	48	96	
4	D.IV	-	1	1	
5	SM	-	-	-	

No	Pendidikan	Pegawai		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
6	D.III	5	3	8	
7	D.II	1		1	
8	D.I	-	-	-	
9	SLTA	32	37	69	
10	SLTP	-	-	-	
11	SD	1	-	1	
	JUMLAH	93	97	190	

Menurut tingkat Pendidikan pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi tingkat pendidikan S1 dengan jumlah 96 orang dan tingkat SLTA sebanyak 69 orang.

4. Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yang menduduki jabatan Eselon
- Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon III. Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2025

No	Eselon	Pegawai		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1	I				
2	II	0	0	0	
3	III	5	0	5	
4	IV	0	2	2	
5	V				
	JUMLAH ESSELON	5	2	7	
	JF	3	4	7	

	PPPK	21	18	39	
	NON ESL	64	73	137	
	TOTAL JUMLAH	93	97	190	

Total pegawai yang menduduki jabatan eselon adalah 7 orang, terdiri dari 5 pria dan 2 wanita. Pegawai dengan jabatan eselon III berjumlah 5 orang, sementara jabatan eselon IV hanya diisi oleh 2. Selain itu, terdapat 7 pegawai yang menduduki jabatan fungsional, dengan komposisi 3 pria dan 4 wanita. Pegawai yang berstatus PPPK sebanyak 39 orang. Sebagian besar pegawai, yaitu 137 orang (64 pria dan 73 wanita), berada pada kategori non-eselon.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pekerjaan yang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aset bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut, yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Data Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2024

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	2	-	Pembelian Tanah Untuk Perluasan TPA Sampah dan Pengadaan Lahan TPA Kecamatan Loa Janan
2	Tanah	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	2	-	Pembebasan Lahan untuk Pembuatan Water Treatment Plant (WTP) Di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak dan Pembebasan lahan untuk Pembuatan Water Treatment Plant (WTP) Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu
3	Tanah	Tanah Untuk Makam lainnya	1	-	
4	Tanah	Tanah Untuk Makam Umum	1	-	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
5	Tanah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	
6	Tanah	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	-	
7	Tanah	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	-	
8	Peralatan dan Mesin	Tractor lainnya (dst)	2	B dan RB	1 Baik dan 1 Rusak Berat
9	Peralatan dan Mesin	Truck Mounted Crane	3	Baik	
10	Peralatan dan Mesin	Mesin proses lainnya (dst)	7	Baik	
11	Peralatan dan Mesin	mesin proses lainnya (dst)	2	B dan RB	1 Baik dan 1 Rusak Berat
12	Peralatan dan Mesin	Dump Truck Mobil NKR 55 CC E2-1	1	Baik	
13	Peralatan dan Mesin	Dump Truck NKR 71 HD	4	Baik	
14	Peralatan dan Mesin	Dump Truck DUTRO 130 HDX POWER	1	Baik	
15	Peralatan dan Mesin	Dump Truck MOBIL BARANG	3	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
16	Peralatan dan Mesin	Dump Truck ARM ROLL TRUCK	1	Baik	
17	Peralatan dan Mesin	Dump Truck Toyota / Dyna	3	Baik	
18	Peralatan dan Mesin	Dump Truck Toyota New Dyna 110ET(TKMQAD3)	6	Baik	
19	Peralatan dan Mesin	Dump Truck	1	Baik	
20	Peralatan dan Mesin	electric generating set lainnya (dst) 180 KVA	5	Baik	
21	Peralatan dan Mesin	electric generating set lainnya (dst) GN 300 MP	1	Baik	
22	Peralatan dan Mesin	pompa lainnya (dst) Mesin Air	2	Rusak Berat	
23	Peralatan dan Mesin	pompa lainnya (dst) Jet Pump	3	Baik	
24	Peralatan dan Mesin	pompa lainnya (dst) Pompa Transfer	1	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
25	Peralatan dan Mesin	pompa lainnya (dst) RTL 300 H	1	Baik	
26	Peralatan dan Mesin	alat pengolahan air kotor lainnya (dst)	1	Baik	
27	Peralatan dan Mesin	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Baik	
28	Peralatan dan Mesin	P.C Unit ASUS	40	B dan RB	31 Baik dan 9 Rusak Berat
29	Peralatan dan Mesin	P.C Unit Tablet PC	14	Rusak Berat	
30	Peralatan dan Mesin	P.C Unit HP	66	B dan RB	5 Baik dan 61 Rusak Berat
31	Peralatan dan Mesin	P.C Unit LENOVO	1	Rusak Berat	
32	Peralatan dan Mesin	P.C Unit FOXCONN	1	Rusak Berat	
33	Peralatan dan Mesin	P.C Unit HP Pavilion	3	Baik	
34	Peralatan dan Mesin	P.C Unit Accer	89	Baik	
35	Peralatan dan Mesin	P.C Unit ROG G13CH-7F1153607WSO	2	Baik	
36	Peralatan dan Mesin	P.C Unit VERITON Z4 AIO - Core 15 (VZ4/0032)	68	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
37	Peralatan dan Mesin	P.C Unit ACER	28	Rusak Berat	
38	Peralatan dan Mesin	Lap Top Accer	30	Baik	
39	Peralatan dan Mesin	Lap Top Apple	5	Baik	
40	Peralatan dan Mesin	Lap Top ASUS	6	Baik	
41	Peralatan dan Mesin	Lap Top ASUS ROG zephyrus M15	1	Baik	
42	Peralatan dan Mesin	Lap Top DELL	5	Baik	
43	Peralatan dan Mesin	Lap Top HP	6	Baik	
44	Peralatan dan Mesin	Lap Top Lenovo	2	Baik	
45	Peralatan dan Mesin	Lap Top Travelmate P214 Core- 17	15	Baik	
46	Peralatan dan Mesin	Note Book SONY	9	Rusak Berat	
47	Peralatan dan Mesin	Note Book SONY VAIO	9	Rusak Berat	
48	Peralatan dan Mesin	Note Book Asus	3	Rusak Berat	
49	Peralatan dan Mesin	Hard Disk CUSTOM	1	Rusak Berat	
50	Peralatan dan Mesin	Hard Disk TOSHIBA	24	Rusak Berat	
51	Peralatan dan Mesin	Hard Disk SEAGATE	41	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
52	Peralatan dan Mesin	Hard Disk Toshiba	24	Baik	
53	Peralatan dan Mesin	Hard Disk	6	Baik	
54	Peralatan dan Mesin	Scanner (Peralatan Mini Komputer) Epson	8	Baik	
55	Peralatan dan Mesin	External/ Portable Hardisk	79	Baik	
56	Peralatan dan Mesin	Monitor NEC	2	Rusak Berat	
57	Peralatan dan Mesin	Monitor Samsung	2	Baik	
58	Peralatan dan Mesin	Monitor	1	Baik	
59	Peralatan dan Mesin	Printer(Peralatan Personal Komputer) Brother	5	B dan RB	2 Baik 3 Rusak Berat
60	Peralatan dan Mesin	Printer (Peralatan Personal Komputer) Canon	5	Rusak Berat	
61	Peralatan dan Mesin	Printer (Peralatan Personal Komputer) Canon Pixma	1	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
62	Peralatan dan Mesin	Printer (Peralatan Personal Komputer) EPSON	140	B dan RB	99 Baik 41 Rusak Berat
63	Peralatan dan Mesin	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson Dot Matrix	5	Baik	
64	Peralatan dan Mesin	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson Ecotank	71	Baik	
65	Peralatan dan Mesin	Printer (Peralatan Personal Komputer) HP	19	Rusak Berat	
66	Peralatan dan Mesin	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Avison	9	Baik	
67	Peralatan dan Mesin	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Epson DS 580W	25	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
68	Peralatan dan Mesin	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Epson Workforce	26	Baik	
69	Peralatan dan Mesin	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Fujitsu	5	Baik	
70	Peralatan dan Mesin	External	2	Rusak Berat	
71	Peralatan dan Mesin	Server	3	B dan RB	2 Baik 1 Rusak Berat
72	Peralatan dan Mesin	Router	1	Rusak Berat	
73	Peralatan dan Mesin	Peralatan Jaringan lainnya Speedy / Wireless	1	Rusak Berat	
74	Peralatan dan Mesin	Peralatan Jaringan lainnya CISCO	7	Rusak Berat	
75	Peralatan dan Mesin	Peralatan Jaringan lainnya LINKSYS	2	Rusak Berat	
76	Peralatan dan Mesin	Peralatan Jaringan lainnya	1	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
77	Peralatan dan Mesin	Modem	1	Rusak Berat	
78	Peralatan dan Mesin	Peralatan Komputer lainnya	1	Baik	
79	Peralatan dan Mesin	alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst) DJI MAVIC	2	Baik	
80	Peralatan dan Mesin	alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst) Drone Mavic	1	Baik	
81	Peralatan dan Mesin	Tenda	2	Rusak Berat	
82	Peralatan dan Mesin	Fire Alarm System	5	Baik	
83	Peralatan dan Mesin	Air Conditioning (AC) Ac Casette	15	Baik	
84	Peralatan dan Mesin	Air Conditioning (AC) AC Split STV50CXV	1	Baik	
85	Peralatan dan Mesin	Air Conditioning (AC) AC Split	2	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
86	Peralatan dan Mesin	Rambu Papan Tambahan	9	Baik	
87	Peralatan dan Mesin	Alat Tennis Meja	1	Baik	
88	Peralatan dan Mesin	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) Toyota Rush 1,5	5	Baik	
89	Peralatan dan Mesin	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) Toyota Innova Zenix 2,0	1	Baik	
90	Peralatan dan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Rush 1.5 S m/T DU	1	Baik	
91	Peralatan dan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Mobil	1	Baik	
92	Peralatan dan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Krista	1	Kurang Baik	
93	Peralatan dan Mesin	Pick Up FORD	1	Baik	
94	Peralatan dan Mesin	Pick Up Toyota New Hilux	2	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
95	Peralatan dan Mesin	Pick Up Mitsubishi / Warna Hitam	1	Baik	
96	Peralatan dan Mesin	Pick Up Daihatsu	1	Baik	
97	Peralatan dan Mesin	Sepeda Motor HONDA	23	Baik	
98	Peralatan dan Mesin	Sepeda Motor Honda NF 100 SE	6	Baik	
99	Peralatan dan Mesin	Sepeda Motor Honda NF 125 TD	3	Baik	
100	Peralatan dan Mesin	Sepeda Motor Honda PCX	13	Baik	
101	Peralatan dan Mesin	Sepeda Motor Honda Scoopy Prestige	1	Baik	
102	Peralatan dan Mesin	Sepeda Motor Yamaha	1	Baik	
103	Peralatan dan Mesin	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst) Honda Vario Techno	19	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
104	Peralatan dan Mesin	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst) HONDA VERZA	6	Baik	
105	Peralatan dan Mesin	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst) HONDA NEW MEGA PRO	1	Baik	
106	Peralatan dan Mesin	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst) VIAR KARYA 200 LMDT	1	Baik	
107	Peralatan dan Mesin	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst) VIAR Karya 200 L	2	Baik	
108	Peralatan dan Mesin	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst) VIAR Karya 200 MDT	3	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
109	Peralatan dan Mesin	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst) VIAR Karya 200 L + Box	1	Baik	
110	Peralatan dan Mesin	Mobil Tinja HINO DUTRO 110 SDL	2	B dan RB	1 Baik dan 1 Rusak Berat
111	Peralatan dan Mesin	Mobil Tinja ISUZU	3	Baik	
112	Peralatan dan Mesin	Mobil Tinja Toyota	1	Baik	
113	Peralatan dan Mesin	Mobil Tangki Air	4	Baik	
114	Peralatan dan Mesin	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) Viar	1	Baik	
115	Peralatan dan Mesin	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) Viar New Karya 200L(Bak Std Long)	1	Baik	
116	Peralatan dan Mesin	Gerobak Tarik	17	Rusak Berat	
117	Peralatan dan Mesin	Kapal Motor	1	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
118	Peralatan dan Mesin	alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	1	Rusak Berat	
119	Peralatan dan Mesin	kapal terbang lainnya (dst)	2	Baik	
120	Peralatan dan Mesin	perkakas pengangkat bermesin lainnya (dst)	1	Baik	
121	Peralatan dan Mesin	Gergaji Chain Saw STIHL 1080	4	Rusak Berat	
122	Peralatan dan Mesin	Gergaji Chain Saw STIHL	8	B dan RB	6 Baik 2 Rusak Berat
123	Peralatan dan Mesin	Gergaji Chain Saw STHILL	24	Baik	
124	Peralatan dan Mesin	perkakas bengkel kayu lainnya (dst) PT 800	1	Rusak Berat	
125	Peralatan dan Mesin	perkakas bengkel kayu lainnya (dst) STIHL	2	Rusak Berat	
126	Peralatan dan Mesin	perkakas bengkel kayu lainnya (dst) Winch	1	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
127	Peralatan dan Mesin	Air Blower	2	Rusak Berat	
128	Peralatan dan Mesin	Rol Meter	5	Rusak Berat	
129	Peralatan dan Mesin	Tangga Latihan	10	Baik	
130	Peralatan dan Mesin	Tool Kit Set	1	Rusak Berat	
131	Peralatan dan Mesin	perkakas khusus (special tools) lainnya (dst)	15	Rusak Berat	
132	Peralatan dan Mesin	Gergaji	7	Rusak Berat	
133	Peralatan dan Mesin	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	65	B dan RB	16 Baik dan 49 Rusak Berat
134	Peralatan dan Mesin	peralatan tukang kayu lainnya (dst)	3	Rusak Berat	
135	Peralatan dan Mesin	alat ukur universal lainnya (dst) Laser Distance Meter	6	Rusak Berat	
136	Peralatan dan Mesin	alat ukur universal lainnya (dst) Rool	5	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
137	Peralatan dan Mesin	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	10	Rusak Berat	
138	Peralatan dan Mesin	DME Ground Station Test Set (Alat Ukur Universal)	1	Rusak Berat	
139	Peralatan dan Mesin	Scanner (Universal Tester)	7	Rusak Berat	
140	Peralatan dan Mesin	alat ukur lain-lain lainnya (dst) Alat Sounding Sungai	1	Rusak Berat	
141	Peralatan dan Mesin	alat ukur lain-lain lainnya (dst) GPS	1	Rusak Berat	
142	Peralatan dan Mesin	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	Rusak Berat	
143	Peralatan dan Mesin	Rak-Rak Penyimpan	30	Rusak Berat	
144	Peralatan dan Mesin	Jaring Angkat Lainnya	1	Rusak Berat	
145	Peralatan dan Mesin	mesin ketik lainnya (dst) OLIMPIA	10	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
146	Peralatan dan Mesin	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) OLIMPIA	17	Rusak Berat	
147	Peralatan dan Mesin	Mesin Ketik Listrik Portable (11-13 Inchi)	1	Rusak Berat	
148	Peralatan dan Mesin	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	1	Rusak Berat	
149	Peralatan dan Mesin	Mesin Fotocopy Folio Toshiba	1	Rusak Berat	
150	Peralatan dan Mesin	Mesin Fotocopy Folio CANON	4	Rusak Berat	
151	Peralatan dan Mesin	Mesin Fotocopy Folio CANON / MESIN	1	Rusak Berat	
152	Peralatan dan Mesin	Lemari Besi/Metal	9	Rusak Berat	
153	Peralatan dan Mesin	Lemari Kayu ACTIV	9	Rusak Berat	
154	Peralatan dan Mesin	Lemari Kayu Activ Galant SC 80G	2	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
155	Peralatan dan Mesin	Lemari Kaca	4	Rusak Berat	
156	Peralatan dan Mesin	Lemari Makan	4	Rusak Berat	
157	Peralatan dan Mesin	Filing Cabinet Besi	8	Rusak Berat	
158	Peralatan dan Mesin	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	6	Rusak Berat	
159	Peralatan dan Mesin	Alat Penghancur Kertas SECURE	4	Rusak Berat	
160	Peralatan dan Mesin	Alat Penghancur Kertas HSM	9	Rusak Berat	
161	Peralatan dan Mesin	Alat Penghancur Kertas GBC 44103103-PKM-000517676	5	Rusak Berat	
162	Peralatan dan Mesin	Alat Penghancur Kertas HSM Securio C16 Strip 3,9 mm	1	Rusak Berat	
163	Peralatan dan Mesin	Mesin Absensi	10	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
164	Peralatan dan Mesin	CCTV - Camera Control Television System WONWOO	2	Rusak Berat	
165	Peralatan dan Mesin	CCTV - Camera Control Television System AVITEC	2	Rusak Berat	
166	Peralatan dan Mesin	Alat Kantor Lainnya	1	Rusak Berat	
167	Peralatan dan Mesin	Peta Garmin Oregon 550	3	Rusak Berat	
168	Peralatan dan Mesin	Peta GARMIN	13	Rusak Berat	
169	Peralatan dan Mesin	Peta Citra	1	Rusak Berat	
170	Peralatan dan Mesin	Kursi Putar	1	Rusak Berat	
171	Peralatan dan Mesin	Meja Komputer	1	Rusak Berat	
172	Peralatan dan Mesin	Partisi	1	Rusak Berat	
173	Peralatan dan Mesin	Alat Pengukur Waktu lainnya	18	Rusak Berat	
174	Peralatan dan Mesin	Mesin Pemotong Rumput TANAKA	10	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
175	Peralatan dan Mesin	Mesin Pemotong Rumput TANAKA 328	19	Rusak Berat	
176	Peralatan dan Mesin	Mesin Pemotong Rumput Harry 328	10	Rusak Berat	
177	Peralatan dan Mesin	Mesin Pemotong Rumput	18	Rusak Berat	
178	Peralatan dan Mesin	Alat Pembersih lainnya	451	Rusak Berat	
179	Peralatan dan Mesin	Lemari Es Kulkas	4	Rusak Berat	
180	Peralatan dan Mesin	Lemari Es LG	9	Rusak Berat	
181	Peralatan dan Mesin	A.C. Split PANOSONIC	9	Rusak Berat	
182	Peralatan dan Mesin	A.C. Split LG	10	Rusak Berat	
183	Peralatan dan Mesin	Alat Dapur lainnya	10	Rusak Berat	
184	Peralatan dan Mesin	Tabung Gas	2	Rusak Berat	
185	Peralatan dan Mesin	Wireless Router	1	Rusak Berat	
186	Peralatan dan Mesin	Wireless Out Door	3	Rusak Berat	
187	Peralatan dan Mesin	Wireless LINKSYS	5	Rusak Berat	
188	Peralatan dan Mesin	Wireless Microphone Treble	1	Rusak Berat	
189	Peralatan dan Mesin	Microphone	22	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
190	Peralatan dan Mesin	Microphone Table Stand	2	Rusak Berat	
191	Peralatan dan Mesin	Mic Conference	1	Rusak Berat	
192	Peralatan dan Mesin	Televisi TV LCD	5	Rusak Berat	
193	Peralatan dan Mesin	Televisi LG 43UF770T	8	Rusak Berat	
194	Peralatan dan Mesin	Camera Video	5	Rusak Berat	
195	Peralatan dan Mesin	Alat Hiasan	15	Rusak Berat	
196	Peralatan dan Mesin	Tangga Aluminium	5	Rusak Berat	
197	Peralatan dan Mesin	Dispenser	12	Rusak Berat	
198	Peralatan dan Mesin	Amplifier	1	Rusak Berat	
199	Peralatan dan Mesin	Gordyin/Kray	1	Rusak Berat	
200	Peralatan dan Mesin	Alat Pemadam/Portable	6	Rusak Berat	
201	Peralatan dan Mesin	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	10	Rusak Berat	
202	Peralatan dan Mesin	Meja Kerja Pejabat lain-lain	12	Rusak Berat	
203	Peralatan dan Mesin	Kursi Kerja Pejabat lainnya	44	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
204	Peralatan dan Mesin	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	2	Rusak Berat	
205	Peralatan dan Mesin	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Rusak Berat	
206	Peralatan dan Mesin	Microphone/Wireless MIC	2	Rusak Berat	
207	Peralatan dan Mesin	Uninterruptible Power Supply (UPS) ICA	4	Rusak Berat	
208	Peralatan dan Mesin	Uninterruptible Power Supply (UPS) CISCO	1	Rusak Berat	
209	Peralatan dan Mesin	Layar Film/Projector Infocus	2	Rusak Berat	
210	Peralatan dan Mesin	Layar Film/Projector BENQ	1	Rusak Berat	
211	Peralatan dan Mesin	Layar Film/Projector ACER X-1161N	1	Rusak Berat	
212	Peralatan dan Mesin	Camera Electronic Sony DSC W-3000	2	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
213	Peralatan dan Mesin	Camera Electronic Canon	2	Rusak Berat	
214	Peralatan dan Mesin	Mesin Pemotong Biasa	3	Rusak Berat	
215	Peralatan dan Mesin	Pager	5	Rusak Berat	
216	Peralatan dan Mesin	Handy Talky (HT)	77	Rusak Berat	
217	Peralatan dan Mesin	Unit Tranceiver Ssb Portable	2	Rusak Berat	
218	Peralatan dan Mesin	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	1	Rusak Berat	
219	Peralatan dan Mesin	switcher antena lainnya (dst)	3	Rusak Berat	
220	Peralatan dan Mesin	Hammer Reffex	1	Rusak Berat	
221	Peralatan dan Mesin	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	4	Rusak Berat	
222	Peralatan dan Mesin	Meja Kerja	57	Rusak Berat	
223	Peralatan dan Mesin	Test For Humidity	7	Rusak Berat	
224	Peralatan dan Mesin	Test For Temperature	1	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
225	Peralatan dan Mesin	Pita Ukuran (Meteran) Metran Manual	2	Rusak Berat	
226	Peralatan dan Mesin	Pita Ukuran (Meteran) Meteran Digital	5	Rusak Berat	
227	Peralatan dan Mesin	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst) Instalasi dan Pemasangan	3	Rusak Berat	
228	Peralatan dan Mesin	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst) Kabel	1	Rusak Berat	
229	Peralatan dan Mesin	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst) Kabel Connector	11	Rusak Berat	
230	Peralatan dan Mesin	Bak Air	4	Rusak Berat	
231	Peralatan dan Mesin	Pot Besar	944	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
232	Peralatan dan Mesin	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	225	Rusak Berat	
233	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	B dan RB	8 Baik dan 3 Rusak Berat
234	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	Baik	
235	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	61	B dan RB	56 Baik dan 5 Rusak Berat
236	Gedung dan Bangunan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2	Baik	
237	Gedung dan Bangunan	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	Baik	
238	Gedung dan Bangunan	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	1	Rusak Berat	
239	Gedung dan Bangunan	Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat	1	Rusak Berat	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
240	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	1	Baik	
241	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1	Baik	
242	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik	
243	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	3	Baik	
244	Gedung dan Bangunan	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1	Baik	
245	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	Baik	
246	Gedung dan Bangunan	Bangunan Tempat Bermain Anak	1	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
247	Gedung dan Bangunan	Bangunan Penerangan Jalan	1	Baik	
248	Gedung dan Bangunan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	10	B, KB, dan RB	6 Baik, 1 Kurang Baik, dan 1 Rusak Berat
249	Gedung dan Bangunan	Taman Permanen	4	Baik	
250	Gedung dan Bangunan	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2	Baik	
251	Gedung dan Bangunan	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	2	B dan RB	1 Baik dan 1 Rusak Berat
252	Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	KB	
253	Gedung dan Bangunan	Flat/rumah Lain-lain (dst)	1	Baik	
254	Gedung dan Bangunan	Flat/Rumah Susun Permanen	1	Baik	
255	Gedung dan Bangunan	Makam Bersejarah	14	Baik	
256	Gedung dan Bangunan	Tugu Pembangunan	2	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
257	Gedung dan Bangunan	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	3	Baik	
258	Gedung dan Bangunan	Tugu Peringatan Lainnya	1	Baik	
259	Gedung dan Bangunan	Pagar Lain-lain (dst)	3	Baik	
260	Gedung dan Bangunan	tugu lainnya (dst)	1	Baik	
261	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Desa Lain-lain	460	Baik	
262	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Desa	96	B dan RB	94 Baik dan 2 Rusak Berat
263	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saluran Drainage	94	B dan RB	92 Baik dan 2 Rusak Berat
264	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	40	Baik	
265	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	29	Baik	
266	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Khusus Lain-lain	27	Baik	
267	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	27	Baik	
268	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Khusus Lainnya	25	B dan RB	24 Baik dan 1 Rusak Berat

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
269	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Distribusi Lain-lain	22	B dan RB	21 Baik dan 1 Rusak Berat
270	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	17	Baik	
271	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Buster Pump	14	Baik	
272	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jembatan Pada Jalan Desa	13	B dan RB	12 Baik dan 1 Rusak Berat
273	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	12	Baik	
274	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jembatan Desa Lain-lain	12	B dan RB	11 Baik dan 1 Rusak Berat
275	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan air minum lainnya	10	Baik	
276	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	9	Baik	
277	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	7	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
278	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	5	Baik	
279	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Saluran lain-lain	5	Baik	
280	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	4	Baik	
281	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Transmisi Lain-lain	4	Baik dan Lainnya	3 Baik dan 1 Lainnya
282	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	4	Baik	
283	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan air kotor lainnya	3	Baik	
284	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Kota Lain-lain (dst)	3	Baik	
285	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	3	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
286	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	3	Baik	
287	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	3	Baik	
288	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jembatan Penyeberangan Orang	3	Baik dan Lainnya	2 Baik dan 1 Lainnya
289	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Kabupaten Arteri	3	Baik	
290	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	3	Baik	
291	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	3	Baik	
292	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	2	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
293	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	2	Baik	
294	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa PE	2	Baik	
295	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	2	Rusak Berat	
296	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jembatan lainnya	2	Baik	
297	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	2	Baik	
298	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	2	Baik	
299	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	2	Baik	
300	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jembatan Khusus Lain- lain	2	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
301	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	1	Baik	
302	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Pembawa Air KOTOR Lain-lain	1	Baik	
303	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	1	Baik	
304	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1	Rusak Berat	
305	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saluran Pembuang	1	Baik	
306	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1	Baik	
307	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	1	Baik	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
308	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	1	Baik	
309	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku)	1	Baik	
310	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lain-lain (dst)	1	Baik	
311	Aset Tetap Lainnya	Tanaman Keras	2	Baik	
312	Aset Tetap Lainnya	Buku Umum Lain-lain	19	Baik	
313	Aset Tetap Lainnya	Tanaman Hias	329	B dan RB	327 Baik dan 2 Kurang Baik
314	Aset Tetap Lainnya	Kartografi, naskah dan lukisan lainnya	1	Baik	
315	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jalan Desa Lain-lain	258	-	
316	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jalan Desa	85	-	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
317	Konstruksi dalam Pengerjaan	Saluran Drainage	41	-	
318	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jalan Khusus Lainnya	25	-	
319	Konstruksi dalam Pengerjaan	Bangunan Penerangan Jalan	11	-	
320	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jembatan Pada Jalan Desa	10	-	
321	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jembatan Desa Lain-lain	9	-	
322	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	8	-	
323	Konstruksi dalam Pengerjaan	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	7	-	
324	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	4	-	
325	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jalan Kabupaten Arteri	3	-	
326	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	3	-	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
327	Konstruksi dalam Pengerjaan	Bangunan air kotor lainnya	2	-	
328	Konstruksi dalam Pengerjaan	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	2	-	
329	Konstruksi dalam Pengerjaan	Buku Laporan Penelitian	2	-	
330	Konstruksi dalam Pengerjaan	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	1	-	
331	Konstruksi dalam Pengerjaan	Flat/rumah Lain-lain (dst)	1	-	
332	Konstruksi dalam Pengerjaan	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	1	-	
333	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	-	
334	Konstruksi dalam Pengerjaan	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	1	-	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
335	Konstruksi dalam Pengerjaan	Bangunan Pengaman Sungai Lainnya	1	-	
336	Konstruksi dalam Pengerjaan	Instalasi gardu listrik lainnya	1	-	
337	Konstruksi dalam Pengerjaan	Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam lainnya	1	-	
338	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jembatan lainnya	1	-	
339	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	-	
340	Konstruksi dalam Pengerjaan	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lain-lain (dst)	1	-	
341	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	-	

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
342	KIB L	Kajian	31	-	
343	KIB L	Lisensi dan Franchise	1	-	
344	KIB L	Software	13	-	

Sumber: KIB, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2024

Aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dimaksud terdiri dari :

1. KIB A / Tanah sejumlah 9
2. KIB B / Peralatan dan Mesin sejumlah 3583
3. KIB C / Gedung dan bangunan sejumlah 134
4. KIB D / Jalan, Irigasi, dan Jaringan sejumlah 991
5. KIB E / Aset Tetap Lainnya sejumlah 351
6. KIB F/ Konstruksi dalam Pengerjaan sejumlah 482
7. KIB L sejumlah 45

2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gambaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tertuang pada tabel 2.6 dibawah ini

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun-				Rasio Capaian tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	1,17	0,22	100%	92%	468%	88%
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian	-	0,72	1,09	1,45	-	1,31	1,39	1,91	-	181,94%	127,52%	132%
3	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	-	79,3	82,48	85,45	-	51,73	45,87	77,42	-	65%	55,61%	91%
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	70,5	71,00	73,00	70,00	94	71,08	70,12	100%	133%	100,11%	90%

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun-				Rasio Capaian tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Temuan Administrasi BPK/Inspektoral yang ditindak Lanjuti	4	1	3	8	4	1	7	8	100%	100%	233%	100 %
6	Persentase Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna	-	-	100			-	100		-	-	100%	
7	Persentase Pengelolaan Pengadaan	-	-	100			-	100		-	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun-				Rasio Capaian tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Barand dan Jasa												
8	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100 %
9	Tingkat Kepatuhan LHKASN	100	100	100	100	99,5	100	100	100	99,50%	100%	100%	100 %
10	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	B(60-70)	B(60-70)	B(60-70)		36,65	45,71	60,5		66,08%	66,08 %	86,43 %	
11	Persentase Keterisian data di	-	100	100		-	100	100		-	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun-				Rasio Capaian tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Aplikasi Satu Data Kukar												
12	Persentase Aplikasi e-Pantau	-	100	100		-	100	100		-	100%	100%	
13	Jumlah Inovasi	-	1	1		-	1	1		-	100%	100%	
14	Capaian Output Kegiatan	-	100	100		-	100	100		-	100%	100%	
15	Persentase Realisasi Fisik	-	100	100		-	100	100		-	100,00%	100%	
16	Persentase Realisasi Keuangan	-	100	100		-	96,52	90,38		-	96,52%	90,38%	
17	Laporan Penyusunan	-	1	1		-	1	1		-	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun-				Rasio Capaian tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Manajemen Resiko maksimal 10 Januari												
18	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	-	-	1		-	-	1		-	-	100%	
19	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim Budaya Kerja	-	-	4		-	-	4		-	-	100%	
20	Persentase Pengembanga	-	-	100		-	-	25,64		-	-	25,64 %	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun-				Rasio Capaian tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	n Kompetensi ASN												
21	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	-	100	100		-	100	100		-	100%	100%	
22	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan	-	100	100		-	100	100		-	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun-				Rasio Capaian tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemerintahan Daerah												
23	Penurunan Prevalensi	-	-	16,5		-		2,79		-	-	16,91 %	
24	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	-	-	100		-		100		-	-	100%	
25	Jumlah Pendapatan	-	Rp354.488.000,00	Rp856.000.000,00		-	Rp166.000.000,00	Rp129.920.000,00		-	46,83 %	15,18 %	

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024, maka secara umum rata-rata capaian kinerja sasaran ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun lalu, yaitu 93,49 persen pada tahun 2023 menjadi 99,31 persen pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 5,82 persen. Hal ini dipengaruhi karena di tahun 2024 pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa sasaran dan indikator

kinerja tambahan yang jumlahnya bertambah lebih banyak dari tahun sebelumnya sehingga sangat berpengaruh terhadap perhitungan rata-rata- capaian kinerja.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	Rp118.907.916.237,00	Rp136.009.657.007,00	Rp352.311.951.006,00	Rp241.991.674.842,00	-	Rp111.628.451.224,00	Rp131.142.421.403,00	Rp338.308.064.717,00	Rp214.559.318.510,00	-	93,88%	96,42%	96,03%	88,66%	47,37%	46,29%
Program Pengelolaan	-	Rp10.429.473.673,00	Rp20.661.235.777,00	Rp31.124.479.000,00	Rp52.929.406.000,00	-	Rp9.672.271.280,00	Rp19.957.375.306,00	Rp29.486.508.326,00	Rp49.757.025.631,00	-	92,74%	96,59%	94,74%	94,01%	72,93%	74,28%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2030	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan Pengembangan Sistem Air Limbah																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	Rp102.354.587.349,00	Rp65.308.985.769,00	Rp90.470.991.571,00	Rp63.655.148.709,00	-	Rp99.445.867.915,00	Rp62.780.757.783,00	Rp82.573.301.530,00	Rp56.999.808.228,00	-	97,16%	96,13%	91,27%	89,54%	-9,10%	-12,10%
Program Pengembangan	Rp63.445.882.240,00	Rp2.260.581.842,00	Rp7.486.374.650,00	Rp10.566.929.560,00	Rp9.766.497.560,00	Rp37.160.218.737,00	Rp1.739.733.200,00	Rp6.956.929.369,00	Rp9.739.561.561,00	Rp6.636.506.838,00	59%	76,96%	92,93%	92,17%	67,95%	42,08%	53,18%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
an Perumahan																	
Program Kawasan Perumahan	-	Rp1.515.481.440,00	Rp1.263.615.440,00	Rp4.113.615.440,00	Rp15.685.660,00	-	Rp1.458.899.240,00	Rp1.057.764.120,00	Rp2.186.134.500,00	Rp12.496.800.620,00	-	96,27%	83,71%	53,14%	79670,23%	36,44%	183,61%
Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh	-	Rp791.454.606,00	Rp10.990.000.000,00	Rp59.952.066.000,00	Rp35.700.000.000,00	-	Rp638.871.325,00	Rp10.899.744.800,00	Rp32.602.134.700,00	Rp27.976.954.410,00	-	80,72%	99,18%	54,38%	78,37%	564,55%	597,01%
Program Pening	-	Rp25.010.208.857,00	Rp26.104.385.216,00	Rp202.291.281.500,00	Rp223.285.524.651,00	-	Rp16.408.917.030,00	Rp25.716.814.706,00	Rp183.696.765.322,00	Rp198.794.523.731,00	-	65,61%	98,52%	90,81%	89,03%	229,90%	226,42%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2030	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
katan Prasar ana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																	

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup masyarakat secara umum, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), korban bencana, serta masyarakat terdampak program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan pemenuhan hunian layak, infrastruktur permukiman, air minum, dan sanitasi. Selain itu, kelompok sasaran juga mencakup pelaku pembangunan, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk sub-urusan perumahan, kawasan permukiman, air minum, dan sanitasi lingkungan. Layanan yang diberikan meliputi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni, penataan kawasan permukiman, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman, serta fasilitasi relokasi atau pembangunan hunian baru dalam rangka mendukung ketahanan sosial dan lingkungan.

Dalam memberikan layanan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai pelaksana utama pembangunan sektor perumahan dan permukiman yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjamin kesetaraan akses terhadap layanan dasar permukiman, dan mendukung terwujudnya lingkungan hunian yang aman, sehat, layak, dan berkelanjutan. Intervensi yang dilakukan diarahkan untuk mengurangi backlog perumahan, mendorong revitalisasi kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur permukiman yang memadai.

Dengan menjadikan masyarakat sebagai kelompok sasaran utama layanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang inklusif, berbasis data, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh warga Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.4 Mitra perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat dilakukan secara parsial. Pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan kebutuhan sektor lain agar pelayanan publik lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalin hubungan kerja dan kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan infrastruktur. Bentuk kemitraan antar-OPD antara lain:

1. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang – berperan sebagai mitra kunci dalam mendukung pelaksanaan program dan pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui integrasi kebijakan, data dan pengawasan tata ruang. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan kawasan permukiman yang tertata, legal dan berkelanjutan. Jadi peran kolaboratif dalam pemberian pelayanan diantaranya adalah penyediaan data dan informasi tata ruang, legalitas dan status pertanahan, koordinasi perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penyelesaian konflik dan penataan kawasan;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa – memiliki peran penting sebagai mitra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat. Sinergi ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan dan partisipatif. Adapun peran kolaboratif dalam pemberian pelayanan meliputi pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat (KSM), integrasi program dana desa, pendampingan dan kapasitas aparatur desa dan pemetaan dan identifikasi kebutuhan permukiman;
3. Dinas Pekerjaan Umum – berperan sebagai mitra teknis dan operasional bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai standar teknis. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Sinergi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, Koordinasi

Teknis dan Standarisasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan fisik dan Integrasi program pembangunan daerah;

4. Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) – berperan sebagai mitra lokal yang mendukung pelaksanaan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pendekatan berbasis masyarakat dan penguatan ekonomi desa. Peran kolaboratif dalam pemberian pelayanan diantaranya adalah dalam hal pelaksanaan program RTLH dan infrastruktur dasar, pengelolaan SPAM dan air bersih desa, pemberdayaan masyarakat dan KSM, dan pemanfaatan dana desa untuk permukiman;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) – berperan sebagai mitra teknis dan koordinator bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam upaya peningkatan ketahanan kawasan permukiman terhadap risiko bencana. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang aman, tangguh dan responsif terhadap potensi bencana. Adapun peran kolaboratif dalam pemberian pelayanan diantaranya adalah identifikasi dan pemetaan risiko bencana, Penyusunan rencana kontinjensi dan mitigasi, Sosialisasi dan edukasi masyarakat dan respons dan rehabilitasi pascabencana;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) – koordinasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor agar program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaras dengan prioritas daerah, termasuk dalam mendukung pengembangan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan strategis lainnya.

Kemitraan antar-perangkat daerah tersebut menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya aktivitas teknis, melainkan instrumen strategis untuk menunjang berbagai sektor pembangunan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai penyedia prasarana dasar yang bersifat enabler, sehingga setiap OPD mitra dapat lebih optimal dalam melaksanakan program kerjanya. Misalnya, dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada penyediaan prasarana dasar seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman yang menjadi pondasi bagi OPD lain untuk menjalankan program sektoral secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kolaborasi lintas OPD juga berperan penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan kebencanaan. Sinergi Dinas PU dengan DLHK serta BPBD memungkinkan terciptanya sistem pengendalian banjir yang terpadu, rehabilitasi ekosistem, dan penyediaan infrastruktur tangguh bencana. Dengan demikian, kemitraan antar-OPD tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membangun ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

2.1.5 Dukungan BUMD dan Stakeholder lainnya dalam pencapaian kinerja PD

Dalam upaya mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang layak, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kutai Kartanegara didukung oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Mahakam sebagai mitra strategis pemerintah daerah. PERUMDA Tirta Mahakam memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik melalui penyediaan infrastruktur jaringan perpipaan maupun peningkatan kapasitas layanan.

Kontribusi BUMD ini tercermin secara langsung pada pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, antara lain:

1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan SPAM – indikator ini menunjukkan sejauh mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama PERUMDA Tirta Mahakam memperluas intervensi pembinaan di tingkat desa dalam rangka mendukung kemandirian masyarakat dalam mengelola sistem penyediaan air minum. Melalui pembinaan kelembagaan desa dan penguatan kapasitas pengelolaan, diharapkan keberlanjutan layanan air minum dapat terjamin secara optimal.
2. Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan – indikator ini menekankan pada keberhasilan peningkatan cakupan layanan langsung kepada masyarakat melalui sambungan rumah (SR). Peran PERUMDA Tirta Mahakam menjadi krusial dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan jumlah pelanggan, serta memastikan kualitas distribusi air minum yang aman dan berkesinambungan.

Melalui kedua indikator tersebut, dukungan PERUMDA Tirta Mahakam bukan hanya memperlihatkan kontribusi nyata terhadap pencapaian

target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi juga memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam pemenuhan hak dasar masyarakat atas air minum yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sinergi ini pada akhirnya diharapkan mampu mendukung pencapaian target SDGs tujuan ke-6 (air bersih dan sanitasi) serta memperkuat ketahanan infrastruktur dasar di Kutai Kartanegara.

Stakeholder lainnya dalam hal ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang memainkan peran strategis sebagai mitra perangkat daerah dalam program rumah layak huni, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Berikut ini adalah bentuk kemitraan dan kontribusi BAZNAS yang relevan untuk konteks daerah seperti Kutai Kartanegara, Peran BAZNAS dalam Program Rumah Layak Huni

1. Kolaborasi Multi-Level

- BAZNAS Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait untuk renovasi rumah tidak layak huni.
- BAZNAS Kutai Kartanegara menargetkan pembangunan 20 unit rumah/ tahun.

2. Pendanaan dan Penyaluran ZIS

- Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) disalurkan untuk bedah rumah mustahik yang tergolong miskin ekstrem.
- Program ini dijalankan dengan prinsip 3A: Aman Syar'i, Aman NKRI, dan Aman Regulasi.

3. Dukungan terhadap SDGs

- Program rumah layak huni BAZNAS mendukung SDGs nomor 11: "Kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan".
- Rumah yang layak berdampak pada kesehatan, pendidikan, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan psikologis masyarakat.

4. Sinergi dengan Pemerintah Daerah

- BAZNAS Kutai Kartanegara dapat menjadi mitra aktif perangkat daerah dalam menyusun Renstra, menyelaraskan indikator RTLH, serta mengintegrasikan data mustahik ke dalam sistem perencanaan pembangunan.

2.1.6. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Dalam konteks urusan perumahan dan kawasan permukiman, kerja sama daerah menjadi tanggung jawab strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memastikan bahwa penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar dapat dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, dan lintas wilayah.

Selama periode perencanaan 2025–2029, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen memperkuat kerja sama daerah melalui beberapa bentuk kolaborasi seperti Kerja sama antar-Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama dalam penyediaan prasarana dasar permukiman yang menjadi *enabler* bagi pelaksanaan program sektor kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Kolaborasi ini mencakup sinkronisasi data spasial, integrasi perencanaan kawasan prioritas, serta penyelarasan indikator kinerja lintas-OPD.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan multidimensional yang saling berkaitan. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, belum meratanya akses terhadap layanan dasar seperti air minum dan sanitasi, serta tingginya kerentanan kawasan terhadap risiko bencana.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan data spasial yang akurat, belum optimalnya integrasi sistem informasi perumahan, serta fragmentasi tata kelola lintas sektor. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tantangan ini berdampak langsung terhadap pencapaian Tujuan SDG's, khususnya Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Permasalahan tersebut menyebabkan ketimpangan antar wilayah dalam menikmati manfaat pembangunan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan akses terhadap layanan publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagian besar infrastruktur masih di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sementara desa-desa di wilayah hulu dan pesisir mengalami keterbatasan akses yang cukup signifikan.

Kondisi jalan yang tidak mantap baik rusak ringan maupun rusak berat, terbatasnya pasokan listrik yang stabil, serta kesulitan memperoleh air bersih, menjadi masalah riil yang masih dihadapi masyarakat. Kondisi seperti ini tidak hanya menghambat pergerakan barang dan jasa, tetapi juga konektivitas dan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara umum, pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai program, seperti peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), penyediaan akses air minum dan sanitasi, serta penanganan kawasan kumuh berbasis kolaborasi program nasional dan daerah.

Namun demikian, sejumlah persoalan mendasar masih perlu mendapatkan perhatian serius agar pembangunan permukiman dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

Tabel. II Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bidang Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya penyediaan sarana sanitasi karena sebagian wilayah belum memiliki akses yang layak terhadap infrastruktur sanitasi dasar seperti jaringan air limbah dan fasilitas MCK sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pencapaian indikator pembangunan.	Kurangnya Infrastruktur dan Sarana Sanitasi yang memadai	Kurangnya infrastruktur dan sarana sanitasi yang memadai berakar pada kombinasi keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya pemanfaatan data spasial dan regulasi teknis, serta tantangan geografis dan kepadatan permukiman yang menyulitkan

Bidang Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pembangunan sistem sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
	Sebagian wilayah belum terlayani oleh sistem air minum perpipaan yang aman dan berkelanjutan, sehingga masyarakat masih bergantung pada sumber air alternatif yang belum tentu memenuhi standar kualitas kesehatan dan pelayanan publik.	Belum meratanya infrastruktur air siap minum perpipaan	Belum meratanya infrastruktur air siap minum perpipaan disebabkan oleh keterbatasan cakupan jaringan, kapasitas teknis PDAM yang belum optimal, kendala geografis, serta belum terintegrasinya kebijakan dan perencanaan lintas sektor. Ketimpangan sosial dan daya beli masyarakat turut memperkuat kesenjangan akses terhadap layanan air minum yang aman dan berkelanjutan.

Bidang Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya data dan informasi mengenai lokasi, luas, dan karakteristik kawasan kumuh tidak tersedia secara mutakhir, akurat, dan terintegrasi, sehingga menghambat perencanaan, penganggaran, dan intervensi program penanganan permukiman kumuh secara efektif.	Terbatasnya pendataan dan pembaruan informasi kawasan kumuh	Terbatasnya pendataan dan pembaruan informasi kawasan kumuh disebabkan oleh lemahnya kapasitas teknis, belum terintegrasinya sistem informasi spasial, minimnya pemanfaatan teknologi, serta kurangnya pelibatan masyarakat dan standar operasional yang baku. Hal ini menyebabkan data yang tersedia tidak akurat, tidak terkini, dan tidak dapat dijadikan dasar perencanaan yang efektif.
	Upaya pencegahan untuk menghindari	Tidak adanya kegiatan pencegahan	Tidak adanya kegiatan pencegahan kawasan kumuh

Bidang Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	terbentuknya kawasan kumuh belum berjalan atau bahkan tidak dilakukan, sehingga permukiman berisiko mengalami degradasi kualitas lingkungan, sosial, dan infrastruktur hingga akhirnya masuk kategori kumuh.	terhadap kawasan kumuh	berakar pada lemahnya kebijakan dan regulasi, kurangnya integrasi perencanaan lintas sektor, keterbatasan anggaran, minimnya data dan sistem monitoring, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kapasitas teknis yang belum memadai. Akibatnya, upaya pembangunan lebih bersifat reaktif (penanganan) daripada proaktif (pencegahan).
	Permukiman yang tumbuh di tepi sungai belum tertata dengan baik, sehingga menimbulkan risiko banjir,	Belum optimalnya penataan permukiman tepi sungai	Belum optimalnya penataan permukiman tepi sungai berakar pada lemahnya regulasi dan penegakan

Bidang Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pencemaran lingkungan, keterbatasan akses infrastruktur dasar, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.		hukum, pertumbuhan permukiman yang tidak terkendali, keterbatasan infrastruktur dasar, kapasitas kelembagaan yang belum terintegrasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kendala teknis dan geografis. Akibatnya, kawasan tepi sungai tetap menjadi titik rawan banjir, pencemaran, dan degradasi lingkungan permukiman.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tugas pokok dan fungsi pelayanan, berikut ini adalah identifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikelompokkan menurut bidang urusannya.

1. Bidang Perumahan

Permasalahan di bidang perumahan terkait dengan belum optimalnya penanganan rumah layak huni di kawasan rawan bencana maupun permukiman tepi sungai. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya data

rumah terdampak bencana, minimnya rencana mitigasi dan relokasi, serta lemahnya keterpaduan antara kebijakan perumahan dengan tata ruang dan mitigasi risiko. Akibatnya, program perumahan rakyat belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hunian layak dan aman bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan berisiko rawan bencana.

Belum optimalnya penanganan rumah layak huni disebabkan karena banyak rumah di kawasan rawan bencana (banjir, longsor, abrasi) dan tepi sungai belum memenuhi standar kelayakan fisik dan lingkungan. Ditambah dengan keterbatasan akses terhadap program bantuan perumahan menyebabkan masyarakat tetap tinggal dilokasi berisiko tinggi. Bentuk keterbatasan yang dimaksud seperti kriteria penerima yang terlalu sempit atau tidak sesuai kondisi lokal, minimnya sosialisasi dan pendampingan, keterbatasan anggaran dan kuota, belum adanya integrasi dengan rencana relokasi atau mitigasi serta keterbatasan koordinasi antar dinas. Terbatasnya data rumah terdampak bencana karena belum tersedia basis data spasial dan terverifikasi mengenai rumah yang terdampak bencana secara langsung maupun berulang. Hal ini menghambat identifikasi prioritas intervensi dan pengalokasian anggaran yang tepat.

2. Bidang Kawasan Permukiman

Meskipun pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami kemajuan, namun belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat sekitar 6,51 persen penduduk yang belum memiliki rumah layak huni. Angka ini menunjukkan bahwa 1 dari 15 penduduk Kukar masih tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan (atap, lantai, dinding, pencahayaan, ventilasi, sanitasi dan air bersih). Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagian masyarakat berada dalam kondisi tempat tinggal yang kurang memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan.

Kondisi tersebut menandakan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya di sektor perumahan, yang semestinya menjadi bagian integral dari upaya pembangunan inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu memperkuat intervensi melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta

meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non pemerintah agar seluruh warga dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

Permasalahan utama yang dihadapi bidang kawasan permukiman adalah kurangnya kolaborasi dengan stakeholder (OPD, Masyarakat, Swasta) yang menyebabkan kurang optimalnya penanganan, pencegahan, dan peningkatan kualitas kawasan kumuh. Belum tersedianya basis data terpadu tentang fungsi hunian yang bisa menggambarkan kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyebabkan proses identifikasi, prioritas, dan penanganan permukiman kumuh belum berjalan optimal. Ketiadaan sistem pendataan yang komprehensif dan terpadu berdampak pada lemahnya upaya pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru, sehingga intervensi pembangunan cenderung bersifat kuratif.

3. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Tingkat kemantapan jalan lingkungan baru mencapai 47,91 persen, menunjukkan bahwa hampir separuh dari panjang total jalan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada dalam kondisi rusak dan atau rusak berat. Hal ini mengakibatkan terhambatnya mobilitas warga, jalan lingkungan yang rusak menyulitkan akses keluar masuk permukiman, terutama saat hujan atau bencana sehingga warga kesulitan menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, dan tempat kerja. Distribusi bantuan dan material terganggu, pengiriman bahan bangunan untuk program RTLH, SPAM non-perpipaan, dan PSU menjadi lambat atau tidak bisa masuk ke lokasi, Bantuan sosial dan layanan darurat sulit menjangkau rumah-rumah di kawasan terdalam. Kualitas lingkungan permukiman dan efektifitas program perumahan dan PSU menurun yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini memperbesar kesenjangan antar wilayah dan memperlambat pemerataan pembangunan.

Selain permasalahan di sektor perumahan dan infrastruktur jalan, capaian pelayanan dasar terkait akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara juga masih belum optimal.

Capaian akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDG's). Pemerintah daerah telah menetapkan air bersih dan sanitasi sebagai prioritas, namun keterjangkauan dan kualitas layanan belum merata di seluruh wilayah.

Data menunjukkan bahwa rumah tangga pengguna air bersih baru mencapai 80,20 persen, sementara rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak baru sebesar 89,10 persen. Kondisi ini menunjukkan 1 dari 5 rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih yang memadai, atau hampir 10,90 persen rumah tangga belum menikmati fasilitas sanitasi yang layak.

Keterbatasan akses ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan atau kawasan padat penduduk. Pemerintah Daerah perlu memperluas cakupan infrastruktur air bersih dan sanitasi dengan pendekatan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, daerah, dan masyarakat, agar seluruh warga dapat terpenuhi hak dasarnya atas lingkungan hidup yang sehat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan pendekatan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan, dengan memperkuat perencanaan berbasis data spasial dan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan sektor swasta dalam membiayai dan membangun infrastruktur dasar yang berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, perlu dikembangkan skema inovatif seperti infrastruktur berbasis komunitas, padat karya, dan digitalisasi layanan, agar pembangunan dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Permasalahan di bidang PSU erat kaitannya dengan ketiadaan basis data yang memadai dan belum optimalnya monitoring terpadu terkait sektor Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Selain hal tersebut diperlukan penetapan klasifikasi kawasan permukiman dan perumahan sehingga sasaran pembangunan sektor Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), air minum dan sanitasi dapat lebih maksimal. Untuk permasalahan air minum, keterjangkauan SPAM layanan jaringan perpipaan belum optimal dan terhadap SPAM khususnya SPAM perdesaan diperlukan peningkatan sinergi dengan

stakeholder terkait dalam hal penguatan kelembagaan engelola SPAM perdesaan. Adapun terhadap sanitasi, dalam peningkatan capaian akses aman masih diperlukan sistem pengelolaan sanitasi terpadu dan berkelanjutan.

4. Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi (SK2R)

Permasalahan di bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi (SK2R) terkait dengan belum optimalnya pengaturan dan pengawasan pembangunan perumahan melalui mekanisme sertifikasi dan registrasi pengembang. Keterbatasan regulasi daerah, lemahnya kapasitas SDM, dan belum berfungsinya sistem sertifikasi berdampak pada kurang terjaminnya kualitas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini berkontribusi terhadap munculnya permukiman tidak layak huni serta lemahnya kepastian hukum dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah permasalahan utama yang bersifat mendasar, berdampak luas, dan perlu ditangani secara prioritas karena mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi atau program. Dalam konteks perencanaan pembangunan (seperti Renstra), isu strategis menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas.

Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada kondisi aktual yang mempengaruhi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu ke depan. Apabila tidak diantisipasi secara tepat, isu-isu tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas hunian, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

Berbagai tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi melalui analisis permasalahan, dinamika pembangunan wilayah, serta kebutuhan pelayanan dasar mendasari perumusan isu strategis ini. Isu-isu strategis ditentukan dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, luasnya dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, serta kemampuan untuk dikelola secara efektif oleh perangkat daerah.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Ketersediaan lahan perumahan dan permukiman	Masih tingginya angka RTLH (6,51%)	Kebutuhan hunian layak dan aman	(Agenda Global SDG 11 dan New Urban Agenda) Mendorong negara dan daerah untuk menyediakan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Kebijakan Hunian Berimbang (Permen PUPR No. 14 Tahun 2016), Program Nasional 3 Juta Rumah	Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Alih Fungsi Lahan di Kawasan Strategis, Keterbatasan Lahan Milik Pemerintah Daerah, Kebijakan Provinsi tentang Hunian Berimbang dan	Belum optimalnya integrasi antara RTRW, RDTR, dan rencana pengembangan perumahan (RP3KP)

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
					Penataan Kawasan	
Infrastruktur jalan lingkungan dan PSU	Kemantapan jalan lingkungan baru 47,91%	Aksesibilitas dan konektivitas permukaan	<i>New Urban Agenda</i> (Habitat III); SDG 11.1 (<i>Housing and Basic Services for All</i>)	Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM	Wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan di Kukar dan Kaltim masih tertinggal dalam akses jalan lingkungan, air bersih, dan sanitasi (RPIW Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya penyediaan PSU di kawasan permukiman, terutama untuk MBR dan kawasan kumuh dan Minimnya data spasial dan baseline kebutuhan PSU untuk

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
					2023-2029)	perencanaan
Tersedianya kawasan permukiman di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan anak sungainya sebagai karakteristik utama wilayah Kukar	Belum optimalnya penataan permukiman tepi sungai	Kesehatan lingkungan, daya dukung dan daya tampung kawasan, risiko bencana	Perubahan iklim dan peningkatan bencana hidrometeorologi	Penanggulan kawasan kumuh dan pemenuhan hunian layak berbasis mitigasi	Risiko banjir tahunan di DAS Mahakam dan tekanan pembanjungan IKN	Tantangan dalam relokasi atau peningkatan kualitas permukiman di sempadan sungai dan Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko tinggal di kawasan rawan bencana.

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi peningkatan layanan sanitasi berbasis program pemerintah dan kemitraan masyarakat	Kurang memadainya infrastruktur dan sarana sanitasi	Pencemaran air dan tanah; penurunan kualitas lingkungan	SDG 6.2 (<i>Sanitation for All</i>)	RPJMN 2025–2029; NSPK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Masih banyak kawasan dengan sanitasi belum layak di Kukar	Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sanitasi untuk mendukung akses air minum layak dan aman
Potensi pengembangan sistem penyediaan air minum melalui SPAM	Belum meratanya infrastruktur air siap minum perpipaan	Krisis air bersih; keterbatasan akses air aman	SDG 6.1 (<i>Safe and Affordable Drinking Water for All</i>)	UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; RPJPN 2025–2045	Kesenjangan layanan SPAM antar kecamatan dan desa di Kukar	Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
jaringan perpipaan maupun non perpipaan						(SPM) layanan SPAM perpipaan dan non perpipaan

Tabel tersebut disusun sebagai hasil pemetaan antara potensi kewenangan daerah, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Setiap baris mencerminkan proses analitis dalam mengidentifikasi isu-isu prioritas yang relevan dan krusial untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tabel ini berfungsi sebagai instrumen untuk menyelaraskan arah pembangunan permukiman daerah dengan agenda nasional maupun tren global yang berdampak langsung pada penyediaan hunian layak dan pengelolaan kawasan permukiman. Isu-isu strategis yang disimpulkan, seperti belum optimalnya integrasi antara RTRW, RDTR, dan rencana pengembangan perumahan (RP3KP), Belum optimalnya penyediaan PSU di kawasan permukiman, terutama untuk MBR dan kawasan kumuh dan Minimnya data spasial dan baseline kebutuhan PSU untuk perencanaan.

1. Penyediaan PSU yang belum optimal

PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) di kawasan permukiman mencakup hal-hal seperti:

- Prasarana: jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, listrik, sanitasi.

- Sarana: fasilitas sosial (posyandu, sekolah, ruang terbuka hijau, tempat ibadah).
- Utilitas: jaringan telekomunikasi, persampahan, penerangan jalan.

Ketika disebut *belum optimal*, maksudnya:

- Banyak kawasan MBR/kumuh yang belum terlayani dengan baik (misalnya air bersih masih mengandalkan sumur gali, drainase tidak terhubung, jalan lingkungan rusak).
- Ada ketimpangan kualitas: PSU di perumahan formal lebih lengkap, sementara di permukiman informal/kumuh sering seadanya.

Keterbatasan anggaran dan koordinasi antar-dinas membuat pembangunan PSU tidak merata

2. Terbatasnya data spasial

Data spasial adalah data berbasis lokasi (peta, koordinat, citra satelit, GIS) yang menunjukkan:

- Sebaran permukiman kumuh.
- Kondisi PSU yang sudah ada (jalan, jaringan air, listrik).
- Potensi lahan untuk pengembangan.

Kalau data spasial terbatas, artinya pemerintah belum punya peta detail dan terintegrasi untuk memetakan kebutuhan PSU. Akibatnya, intervensi sering tidak tepat sasaran atau tumpang tindih.

3. Terbatasnya baseline

Baseline adalah data dasar/indikator awal yang dipakai untuk mengukur kondisi sebelum program berjalan. Misalnya:

- Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
- Persentase akses air minum layak.
- Persentase akses sanitasi layak.
- Luas kawasan kumuh.

Kalau baseline terbatas, berarti:

- Tidak ada angka pasti untuk memulai perencanaan.
- Sulit mengukur kemajuan program (apakah PSU sudah meningkatkan kualitas hidup MBR).
- Perencanaan jadi lebih banyak berdasarkan asumsi daripada data.

Tantangan dalam relokasi atau peningkatan kualitas permukiman di sempadan sungai dan Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko tinggal di kawasan rawan bencana.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko hunian di sempadan sungai akan mengakibatkan :

- Risiko banjir dan longsor: Banyak warga belum menyadari bahwa tinggal di sempadan sungai meningkatkan kerentanan terhadap bencana.
- Risiko kesehatan: Hunian di bantaran sungai sering berdekatan dengan limbah, sehingga rawan penyakit berbasis lingkungan (diare, leptospirosis, dll).
- Risiko hukum dan tata ruang: Sempadan sungai sebenarnya adalah kawasan lindung, sehingga hunian di sana tidak sesuai dengan aturan tata ruang.
- Hambatan program: Karena kesadaran rendah, masyarakat cenderung menolak relokasi atau enggan berpartisipasi dalam program peningkatan kualitas permukiman.

Maksudnya meskipun pemerintah berupaya memperbaiki kawasan, partisipasi masyarakat masih lemah karena mereka belum melihat risiko hunian sebagai masalah serius.

Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sanitasi untuk mendukung akses air minum layak dan aman, belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan SPAM perpipaan dan non perpipaan, merupakan refleksi dari kompleksitas tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. SPM adalah standar dasar layanan publik yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.

- SPM Air Minum: Targetnya setiap orang mendapat akses air minum layak (misalnya 60 liter per orang per hari, kualitas sesuai standar kesehatan).
- SPM Sanitasi: Targetnya setiap orang mendapat akses sanitasi aman (misalnya jamban sehat, sistem pengolahan limbah domestik).

Ketika disebut *belum optimal*, maksudnya:

- Cakupan layanan masih rendah: Banyak MBR belum terhubung ke jaringan air minum perpipaan, masih bergantung pada sumur atau air sungai.
- Kualitas layanan belum konsisten: Air minum yang tersedia sering tidak memenuhi standar kualitas (keruh, berbau, tidak aman).
- Sanitasi belum aman: Banyak rumah masih menggunakan septic tank tidak kedap atau buang langsung ke sungai.
- Keterbatasan kapasitas daerah: Anggaran, SDM, dan koordinasi antar-dinas belum cukup untuk memenuhi target SPM.

Maksudnya meskipun ada standar nasional, implementasi di lapangan belum menjamin semua warga mendapat air minum layak dan sanitasi aman.

Isu-isu tersebut tidak hanya bersumber dari kondisi lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan nasional dan global, seperti komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), agenda *New Urban Agenda* dan *Sendai Framework*, serta kebijakan nasional mengenai perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi.

Melalui tabel ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat merumuskan arah kebijakan dan prioritas program yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Pengelompokan isu berdasarkan sumber dan tingkatannya membantu menghasilkan strategi intervensi yang terukur, memperkuat integrasi antara perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, serta mendukung prinsip pembangunan permukiman yang berbasis bukti, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin di raih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

Tujuan RENSTRA adalah rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Perumusan tujuan dilakukan dengan berlandaskan pada penyelesaian isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, sehingga arah kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar menjawab permasalahan mendasar di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tujuan juga berfungsi sebagai pedoman utama bagi penyusunan sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sesuai dengan Misi ke-1 Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial dan Misi ke-5 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, kemudian diturunkan ke dalam tujuan RPJMD Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan indikator tujuan Tingkat Kemiskinan.

Oleh karena itu, Tujuan yang ditetapkan diarahkan untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau, sejalan dengan Visi Kabupaten “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

Dengan demikian, Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah: Meningkatkan akses hunian yang layak, aman dan terjangkau.

Tujuan ini menekankan pentingnya penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang tidak hanya memenuhi standar kelayakan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan terhadap bencana. Melalui pencapaian tujuan ini, diharapkan terwujud kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, pengurangan ketimpangan akses permukiman, serta dukungan nyata terhadap pembangunan wilayah yang inklusif dan berkeadilan.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Rencana Strategis merupakan hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode jangka menengah. Sasaran ini disusun sebagai penjabaran lebih operasional dari tujuan strategis, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam perumusannya, sasaran harus memenuhi prinsip SMART:

- *Specific*: dirumuskan secara jelas dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai.
- *Measurable*: memiliki indikator kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif.
- *Achievable*: realistis untuk dicapai sesuai dengan kapasitas, sumber daya, dan kondisi daerah.
- *Relevant*: relevan dengan tujuan strategis, kebijakan nasional maupun daerah, serta kebutuhan masyarakat.
- *Time-bound*: ditetapkan dalam kerangka waktu yang terukur, dengan target tahunan yang konsisten.

Setiap sasaran RENSTRA wajib dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya tolok ukur yang jelas dalam menilai keberhasilan pencapaian

sasaran, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah. Dengan demikian, sasaran RENSTRA tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali dan evaluasi kinerja organisasi.

Dalam konteks urusan perumahan dan kawasan permukiman, sasaran yang ditetapkan tidak hanya menekankan aspek penyediaan hunian layak, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan sanitasi dan air minum, yang menjadi elemen penting dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kondisi sanitasi layak, dengan indikator sasaran Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak;
2. Meningkatnya sanitasi aman, dengan indikator sasaran Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman;
3. Meningkatnya pemerataan layanan air minum layak perpipaan, dengan indikator sasaran Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan; dan
4. Meningkatnya permukiman layak huni, dengan indikator sasaran Rasio Permukiman Layak Huni.

Sasaran-sasaran tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret dalam upaya peningkatan kualitas hunian, pemenuhan layanan dasar, serta pengurangan ketimpangan akses permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan dan sasaran ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Sasaran tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja utama yang terukur dan rencana target pencapaiannya selama periode 2025–2029, yang dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sasaran, indikator, dan target tahunan.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	2,12	2,29	2,55	2,81	3,06	3,32	3,58	
		Meningkatnya kondisi sanitasi layak	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	89,10	98,91	98,94	99,16	99,30	99,38	99,40	
		Meningkatnya kondisi sanitasi aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	0,34	1,55	1,64	2,58	3,64	4,82	6,02	
		Meningkatnya pemerataan layanan air minum layak	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan(%)	80,20	82,36	84,78	87,28	89,84	92,49	96,11	
		Meningkatnya Permukiman Layak Huni	Rasio Permukiman Layak Huni	97,87	98,81	98,78	98,77	98,76	98,74	98,74	

Tabel tersebut menyajikan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode perencanaan 2025–2029. Indikator-indikator ini mencakup aspek layanan dasar perumahan dan kawasan permukiman, akses hunian layak, layanan sanitasi, serta pemerataan akses air minum. Setiap indikator dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah.

Di antaranya adalah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Selain itu, indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak mencerminkan upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan sesuai standar kesehatan. Indikator Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerataan akses air bersih telah terpenuhi di seluruh wilayah kabupaten. Sementara itu, Rasio Permukiman Layak Huni menjadi ukuran penting dalam menilai tingkat kelayakan kawasan permukiman secara keseluruhan.

Keseluruhan indikator tersebut menggambarkan arah pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar yang berorientasi pada penyediaan layanan dasar permukiman yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui evaluasi capaian indikator setiap tahunnya, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dalam ketersediaan hunian layak, layanan sanitasi, serta pemerataan akses air minum, sehingga mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan tangguh.

3.3 Strategi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

Strategi memegang peran penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan arah bagi perangkat daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur akan mampu mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penyusunan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, baik yang bersumber dari permasalahan utama maupun dari dinamika lingkungan pembangunan daerah, nasional, hingga global. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan komprehensif yang meliputi optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penahapan pembangunan permukiman, penetapan lokus prioritas kawasan, serta pemilihan program yang benar-benar relevan untuk meningkatkan akses hunian layak, layanan sanitasi, air minum, dan kualitas permukiman. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar terarah, sinergis, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai bagian dari strategi implementatif Renstra, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengacu pada tema pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan tema ini bertujuan untuk memberikan fokus pembangunan yang bertahap dan berkesinambungan, serta memastikan keterpaduan program lintas sektor yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman layak huni, aman, sehat, dan berkelanjutan.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Inventarisasi kondisi	Penataan awal kawasan	Revitalisasi kawasan	Evaluasi penurunan	Konsolidasi standar

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
perumahan dan kawasan permukiman (data kumuh, hunian layak, PSU, air minum, sanitasi).	kumuh prioritas melalui perbaikan infrastruktur dasar.	kumuh dan peningkatan PSU di kawasan perkotaan dan perdesaan.	luas kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.	penanganan kawasan kumuh sesuai regulasi nasional dan praktik terbaik.
Pemetaan kebutuhan rumah layak huni untuk MBR, korban bencana, dan relokasi program pemerintah.	Fasilitasi pembangunan rumah layak melalui program bantuan stimulan dan kolaborasi.	Skema pembiayaan inovatif (CSR, KPBU kecil, kolaborasi dengan pengembang lokal).	Evaluasi efektivitas skema pembiayaan dan penyediaan rumah layak huni.	Institusionalisasi kebijakan pembiayaan berkelanjutan perumahan rakyat.
Identifikasi kondisi akses air minum dan sanitasi di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan dan pembangunan sanitasi komunal.	Peremajaan jaringan perpipaan lama dan penguatan pengelolaan sistem sanitasi lingkungan.	Integrasi layanan air minum dan sanitasi dengan sistem pelayanan dasar kabupaten.	Konsolidasi standar pelayanan air minum dan sanitasi berkelanjutan sesuai SPM.
Pemetaan kawasan tepi sungai Mahakam dan anak-anak sungainya yang berisiko.	Penataan awal permukiman tepi sungai (relokasi terbatas, PSU dasar,	Pengembangan model permukiman tangguh bencana berbasis komunitas di tepi sungai.	Evaluasi penurunan kerentanan permukiman tepi sungai terhadap	Konsolidasi tata kelola kawasan tepi sungai sesuai RTRW dan adaptasi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	penguatan drainase).		banjir dan pencemaran	perubahan iklim.
Inventarisasi dan audit prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan perumahan.	Penyediaan PSU dasar (jalan lingkungan, drainase, penerangan, ruang terbuka hijau).	Modernisasi dan perluasan PSU di kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai standar teknis.	Evaluasi efektivitas PSU dalam mendukung kualitas hidup masyarakat.	Konsolidasi regulasi penyediaan dan pemeliharaan PSU oleh pemerintah daerah.

Adapun penahapan pembangunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 dijabarkan melalui strategi berikut:

Tahap I (2026): “Penguatan Basis Data dan Pemetaan Permukiman untuk Perencanaan yang Tepat Sasaran”

Pada tahap awal, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan basis data perumahan dan kawasan permukiman melalui inventarisasi dan pemetaan menyeluruh. Kegiatan ini mencakup pendataan kawasan kumuh, hunian layak, akses air minum, sanitasi, serta kondisi PSU di wilayah perkotaan dan perdesaan. Dengan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi, intervensi pembangunan di tahun-tahun berikutnya dapat direncanakan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tahap II (2027): “Penataan Awal Kawasan Permukiman Kumuh dan Peningkatan Akses Layanan Dasar”

Pada tahap kedua, pembangunan difokuskan pada penataan awal kawasan permukiman kumuh prioritas melalui perbaikan infrastruktur dasar, penyediaan PSU, serta peningkatan akses air minum dan sanitasi komunal. Upaya ini juga diperkuat dengan penataan awal kawasan tepi sungai Mahakam melalui relokasi terbatas dan penguatan drainase. Tujuan utama

tahap ini adalah meletakkan fondasi intervensi yang konkret untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Tahap III (2028): “Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penguatan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan”

Tahap ketiga menjadi fase revitalisasi menyeluruh, dengan fokus pada peningkatan kualitas kawasan kumuh, pengembangan PSU, peremajaan jaringan air minum, serta penguatan sistem pengelolaan sanitasi. Selain itu, model permukiman tangguh bencana berbasis komunitas mulai dikembangkan di kawasan tepi sungai. Revitalisasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan pembangunan permukiman.

Tahap IV (2029): “Evaluasi Dampak Pembangunan dan Optimalisasi Layanan Permukiman”

Tahap keempat difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap hasil intervensi pembangunan yang telah dilakukan. Evaluasi mencakup penurunan luas kawasan kumuh, pencapaian penyediaan rumah layak huni, efektivitas layanan air minum dan sanitasi, serta keberlanjutan PSU dan penataan permukiman tepi sungai. Evaluasi ini sekaligus menjadi dasar untuk mengoptimalkan layanan yang sudah ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahap V (2030): “Konsolidasi Kebijakan dan Standarisasi Layanan Permukiman Berkelanjutan”

Tahap terakhir diarahkan pada konsolidasi hasil pembangunan melalui penyusunan dan penerapan standar penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak, layanan air minum, sanitasi, dan tata kelola kawasan tepi sungai. Dengan konsolidasi ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar berupaya memastikan keberlanjutan program dan menjadikannya rujukan kebijakan jangka panjang yang mendukung visi daerah sebagai mitra strategis IKN dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan berkelanjutan.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi perangkat daerah. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah serta relevan dengan isu-isu strategis di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Perumusan arah kebijakan ini memperhatikan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat akan hunian layak dan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga memperkuat tata kelola pembangunan permukiman, mendorong partisipasi masyarakat, serta memastikan pemerataan akses terhadap layanan dasar.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD (Misi 5)	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Keterangan
1	Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar	Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kukar	Penyediaan PSU permukiman (jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, RTH, rumah ibadah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman fokus pada infrastruktur dasar permukiman perkotaan & perdesaan
2	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan produktif	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan	Penataan kawasan permukiman perdesaan berbasis potensi lokal dengan dukungan PSU dan perumahan layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk pada aspek penyediaan permukiman yang

No	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD (Misi 5)	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Keterangan
				menunjang sektor produktif
3	Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN	Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN	Pembangunan SPAM desa, sanitasi komunal, PSU dasar, dan perumahan layak di desa penyangga IKN	Mendukung Kukar sebagai mitra strategis IKN
4	Modernisasi desa berbasis digital & energi	Modernisasi desa melalui <i>smart village</i> (internet, sistem layanan digital, energi alternatif)	Penyediaan permukiman berbasis energi baru terbarukan (PLTS komunal, SHS) dan pengembangan hunian ramah lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat dimensi lingkungan & hunian dalam program smart village
5	Penguatan konektivitas antar wilayah	Penguatan konektivitas & logistik antar kawasan	Penataan kawasan permukiman di jalur konektivitas strategis dan penyediaan PSU untuk mendukung mobilitas penduduk	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan hunian di jalur strategis
6	Pengembangan logistik wilayah	Pengembangan logistik wilayah	Penyediaan hunian layak di	Dinas Perumahan dan

No	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD (Misi 5)	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Keterangan
		& jaringan distribusi antar wilayah	kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan pusat distribusi/logistik	Kawasan Permukiman memastikan standar permukiman mendukung sistem distribusi regional
7	Peningkatan aksesibilitas ke IKN	Peningkatan kualitas & aksesibilitas infrastruktur menuju IKN	Penataan kawasan perumahan dan permukiman serta penyediaan PSU di wilayah yang terhubung langsung dengan akses IKN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung integrasi Kukar dengan IKN
8	Pembangunan infrastruktur cerdas	Pembangunan infrastruktur cerdas: transportasi massal, energi bersih, kawasan hijau	Pengembangan permukiman hijau: ruang terbuka hijau, taman kota, drainase ramah lingkungan, PSU berbasis energi bersih	Selaras dengan target SDGs 11 (<i>Sustainable Cities & Communities</i>)
9	Implementasi infrastruktur terintegrasi	Implementasi infrastruktur terintegrasi	Penataan kawasan tepi Sungai Mahakam, penyusunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD (Misi 5)	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Keterangan
		kawasan strategis	grand desain kawasan permukiman baru, serta penyediaan lahan perumahan rakyat	mendukung implementasi RTRW Kukar 2023–2042 dan kawasan strategis

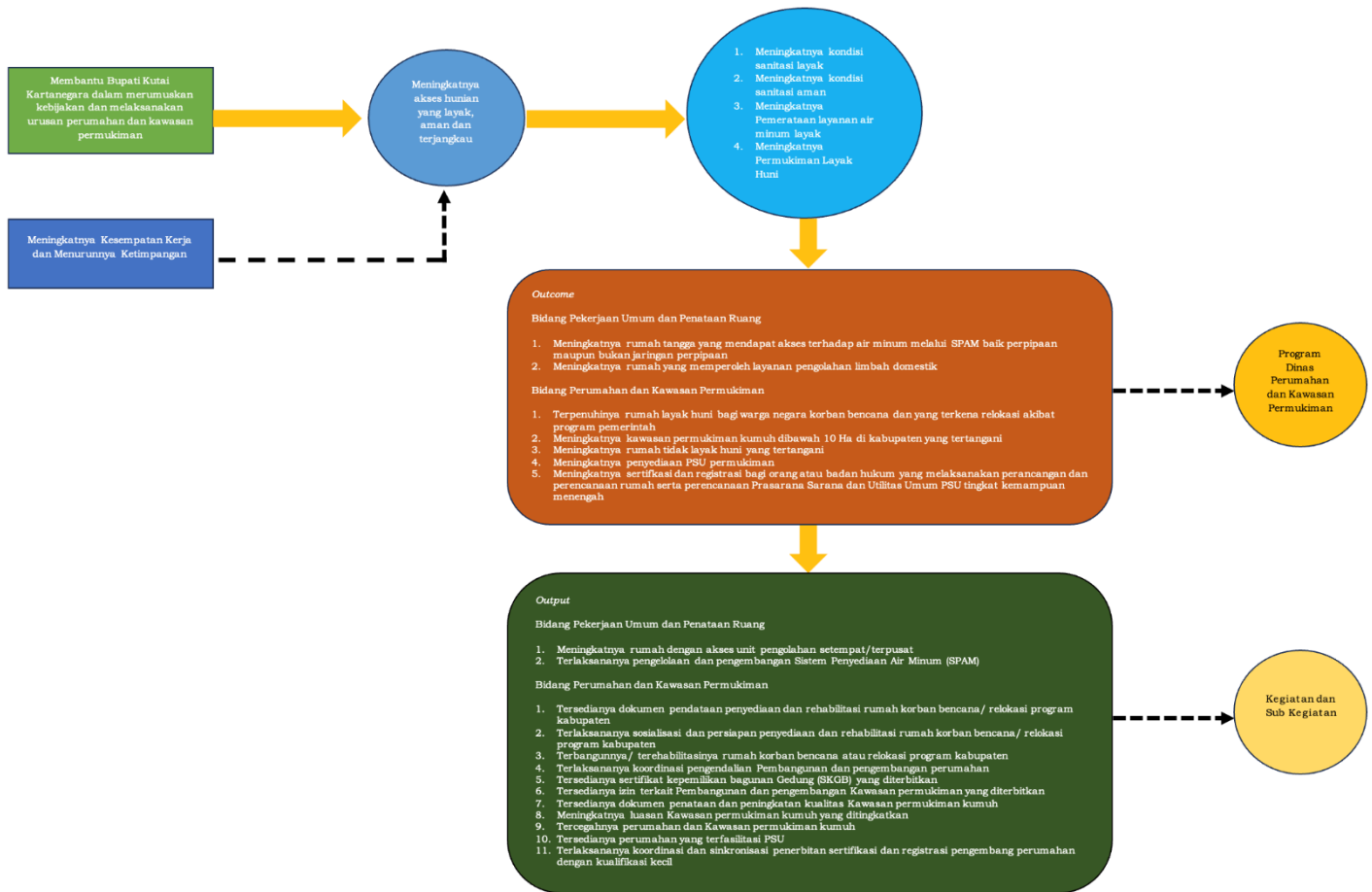
BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui serangkaian program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terstruktur, terukur, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Program merupakan instrumen kebijakan yang menjadi payung bagi pelaksanaan kegiatan, sedangkan kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan bentuk operasional yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam periode perencanaan 2025–2029, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas permukiman, penyediaan hunian layak, serta penguatan prasarana, sarana, dan utilitas dasar. Program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan yang lebih spesifik, seperti pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non-perpipaan, penyediaan sanitasi layak dan aman serta penataan kawasan kumuh. Setiap kegiatan kemudian dirinci ke dalam Sub Kegiatan yang bersifat teknis dan operasional, misalnya penyusunan dokumen perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pendampingan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi lapangan.

Dengan struktur program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang jelas serta indikator kinerja yang terukur, penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, serta memperkuat peran Kutai Kartanegara dalam mendukung kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman.



Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.1 Uraian Program Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program merupakan kumpulan kegiatan yang saling terkait dan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Program menjadi instrumen strategis yang menggambarkan arah kebijakan serta upaya sistematis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Setiap program ditentukan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, program yang dirumuskan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan kebijakan nasional dan struktur program yang telah ditetapkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI).

Melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan dapat diintegrasikan secara terpadu sehingga menghasilkan capaian kinerja yang terukur. Program juga

berfungsi sebagai payung kebijakan yang memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman berjalan konsisten, efektif, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Program dan kegiatan yang terukur dan terarah mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program urusan dan program penunjang urusan. Program urusan berfungsi untuk mencapai tujuan dinas yang telah sinergikan dengan tujuan daerah sedangkan program penunjang urusan adalah program kesekretariatan yang berfungsi untuk melayani rumah tangga dalam rangka menunjang tujuan dinas. Adapun kerangka perumusan program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					208.255.5 00.000,00		52.905.000.00 0,00		141.668.009.0 00,00		142.502.109.0 00,00		142.502.109. 000,00
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					130.828.0 00.000,00		50.775.000.00 0,00		112.528.000.0 00,00		113.970.000.0 00,00		113.970.000. 000,00
Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan	Persentase rumah tangga yang mendapatka n akses terhadap air minum melalui	80,20	83,26	84,78	130.828.0 00.000,00	87,28	50.775.000.00 0,00	89,84	112.528.000.0 00,00	92,49	113.970.000.0 00,00	96,11	113.970.000. 000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU
jaringan perpipaan	SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten (%)												
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH					77.427.50 0.000,00		2.130.000.000 ,00		29.140.009.00 0,00		28.532.109.00 0,00		28.532.109.0 00,00
Meningkatnya rumah yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	89,10	98,91	98,94	77.427.50 0.000,00	99,16	2.130.000.000 ,00	99,30	29.140.009.00 0,00	99,38	28.532.109.00 0,00	99,40	28.532.109.0 00,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					173.620.1 85.757,00		452.217.401.8 70,72		505.114.955.2 64,34		507.459.610.0 21,09		496.927.045. 003,45
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					32.882.93 5.757,00		36.546.331.85 3,00		36.896.331.85 3,00		38.396.331.85 3,00		38.396.331.8 53,00
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	70,12	100	70,50	32.882.93 5.757,00	71	36.546.331.85 3,00	71,50	36.896.331.85 3,00	72	38.396.331.85 3,00	72,50	38.396.331.8 53,00
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN					43.201.00 0.000,00		71.595.000.00 0,00		46.795.000.00 0,00		46.395.000.00 0,00		46.395.000.0 00,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	100	43.201.00 0.000,00	100	71.595.000.00 0,00	100	46.795.000.00 0,00	100	46.395.000.00 0,00	100	46.395.000.0 00,00
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas rumah layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					4.875.000 .000,00		4.850.000.000 ,00		4.600.000.000, 00		4.600.000.000, 00		4.600.000.00 0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang tertangani	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/k ota ditangani (%)	77,42	92,26	43,66	4.875.000 .000,00	60,56	4.850.000.000 ,00	77,46	4.600.000.000, 00	88,73	4.600.000.000, 00	100	4.600.000.00 0,00
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					40.300.00 0.000,00		50.667.500.00 0,00		50.667.500.00 0,00		50.667.500.00 0,00		50.667.500.0 00,00
Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani (%)	43,56	44,78	53,90	40.300.00 0.000,00	65,43	50.667.500.00 0,00	76,95	50.667.500.00 0,00	88,48	50.667.500.00 0,00	100	50.667.500.0 00,00
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN					52.286.25 0.000,00		287.558.570.0 17,72		365.156.123.4 11,34		366.400.778.1 68,09		355.868.213. 150,45

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU
UTILITAS UMUM (PSU)													
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (%)	16,03	37,97	46,41	52.286.25 0.000,00	54,85	287.558.570.0 17,72	63,29	365.156.123.4 11,34	71,73	366.400.778.1 68,09	80,17	355.868.213. 150,45
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					75.000.00 0,00		1.000.000.000 ,00		1.000.000.000, 00		1.000.000.000, 00		1.000.000.00 0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksana n Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	0	0	11,76	75.000.00 0,00	17,65	1.000.000.000 ,00	23,53	1.000.000.000, 00	29,41	1.000.000.000, 00	35,29	1.000.000.00 0,00
TOTAL KESELURUHAN					381.875.6 85.757		505.122.401.8 70,72		646.782.964.2 64,34		649.961.719.0 21,09		639.429.154. 003,45

4.2 Uraian Kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan merupakan bagian dari program yang terdiri atas satu atau beberapa Sub Kegiatan, dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) tertentu yang secara langsung mendukung pencapaian indikator program. Kegiatan menjadi instrumen operasional yang menjembatani antara arah kebijakan strategis dalam program dengan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Setiap kegiatan dirancang agar berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan dapat bersifat operasional maupun teknis, seperti pengelolaan data dan informasi permukiman, pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pembangunan fisik prasarana dasar, serta monitoring dan evaluasi lapangan. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya menghasilkan keluaran yang terukur, tetapi juga memperkuat tata kelola, koordinasi lintas-OPD, dan efektivitas pelaksanaan program.

Melalui pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan konsisten, perangkat daerah memastikan bahwa setiap program dapat berjalan sesuai arah kebijakan, indikator kinerja dapat dicapai, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Kegiatan menjadi wujud konkret dari komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah dapat dilihat pada tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.1.03.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan	Meningkatkan akses hunian yang layak, aman dan terjangkau				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
		Meningkatnya kondisi sanitasi layak			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%) (%)		
			Meningkatnya rumah yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatn ya rumah dengan akses unit pengolahan setempat/te rpusat	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang di optimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar <i>individual</i> dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang di optimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)		
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang di optimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang di optimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar <i>individual</i> dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya penyusunan dokumen rencana,	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksana nya penyusuna n laporan Administras i Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perangkat Daerah yang akuntabel			
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana nya penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1.04.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksana nya penyusuna n Dokumen Administras i Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.04.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksana nya layanan Administras i Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana nya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana nya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kondisi sanitasi aman			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
			Meningkatnya rumah yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatn ya rumah dengan akses unit pengolahan setempat/te rpusat	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang di optimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar <i>individual</i> dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang di optimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)		
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang di optimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang di optimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar <i>individual</i> dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya penyusunan dokumen rencana,	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksana nya penyusuna n laporan Administras i Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perangkat Daerah yang akuntabel			
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana nya penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1.04.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksana nya penyusuna n Dokumen Administras i Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.04.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksana nya layanan Administras i Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana nya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana nya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pemerataan layanan air minum layak			Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan (%)		
			Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			jaringan perpipaan				
				Terlaksana nya pengelolaan dan pengemban gan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang di optimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang di optimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1.03.03.2.01.0030 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang di optimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang di optimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya penyusunan dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perangkat Daerah (Berita Acara)	Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksana nya penyusuna n Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana nya penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.04.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perangkat Daerah			
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksana nya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Permukiman Layak Huni			Rasio Permukiman Layak Huni (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksana nya penyusunan dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				(BMD) pada Perangkat Daerah			
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		
				Terlaksana nya penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.04.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana nya layanan Administras i Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksana nya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			yang terkena relokasi akibat program pemerintah				
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Tersedianya dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/rel	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				okasi program kabupaten			
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksana nya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/rel okasi	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				program kabupaten			
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
					Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terbangunnya/Ter-rehabilitasinya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Ter-rehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Ter-rehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03.0008 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Terlaksana nya koordinasi pengendalia n pembangun an dan pengemban	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				gan perumahan	Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pengembangan Perumahan (Laporan)	dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)	1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
					Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembang an/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
			Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			kabupaten yang tertangani				
				Tersedianya izin terkait pembangun an dan pengemban gan kawasan permukima n yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	
				Tersedianya dokumen penataan dan peningkata n kualitas kawasan permukima n kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlega lisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatkan luas kawasan permukiman yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Tercegahnnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan	1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Permukiman Kumuh Baru (Orang)		
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Tersedianya perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana nya koordinasi dan Sinkronisas i penerbitan sertifikasi dan registrasi pengemban g perumahan dengan kualifikasi kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi	1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	

4.3 Uraian Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Kegiatan merupakan unit terkecil dari rencana pembangunan yang mendeskripsikan langkah operasional teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sub Kegiatan dirancang untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang terukur, sehingga dapat menjadi dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Setiap Sub Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif anggaran yang menjadi acuan dalam pelaksanaan. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah operasional memiliki arah yang jelas, ukuran keberhasilan yang objektif, serta dukungan sumber daya yang memadai.

- Indikator Kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Sub Kegiatan, baik dari sisi keluaran maupun dampak yang dihasilkan. Indikator disusun secara spesifik, relevan, dan terukur agar dapat mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran program.
- Target merupakan nilai atau capaian yang direncanakan dalam satu tahun atau periode tertentu. Target ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan, kondisi eksisting, serta proyeksi kemampuan daerah, sehingga menjadi tolok ukur pencapaian kinerja.
- Pagu Indikatif adalah proyeksi alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Sub Kegiatan selama satu atau lebih tahun. Pagu indikatif disusun secara realistis dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta dukungan sumber pendanaan lainnya.

Dengan adanya uraian Sub Kegiatan yang jelas, lengkap dengan indikator, target, dan pagu indikatif, perangkat daerah dapat melaksanakan pembangunan secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Sub Kegiatan menjadi wujud konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, sekaligus memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				208.255.50 0.000,00		52.905.000 .000,00		141.668.00 9.000,00		142.502.10 9.000,00		142.502.10 9.000,00	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				130.828.00 0.000,00		50.775.000 .000,00		112.528.00 0.000,00		113.970.00 0.000,00		113.970.00 0.000,00	
Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten (%)	80,20	84,7 8	130.828.00 0.000,00	87,2 8	50.775.000 .000,00	89,8 4	112.528.00 0.000,00	92,4 9	113.970.00 0.000,00	96,1 1	113.970.00 0.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				130.828.00 0.000,00		50.775.000 .000,00		112.528.00 0.000,00		113.970.00 0.000,00		113.970.00 0.000,00	
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)		40	130.828.00 0.000,00	23	50.775.000 .000,00	22	112.528.00 0.000,00	23	113.970.00 0.000,00	23	113.970.00 0.000,00	
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	20			20		20		20		20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.717	1.714		1.000		1.000		1.000		1.000		
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	63	110		30		75		220		220		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	7.221	3										
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang di optimalisasi (Unit)	7.221	91										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	0			1		1		1		1		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang di optimalisasi (Unit)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0			1		1		1		1		
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	65	5		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	0	20		20		20		20		20		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	2	2		3								
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				9.000.000. 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	7.221	3	9.000.000. 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	20		0,00	20	300.000.00 0,00	20	300.000.00 0,00	20	300.000.00 0,00	20	300.000.00 0,00	
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1.900.000. 000,00		4.000.000. 000,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	2	2	1.900.000. 000,00	3	4.000.000. 000,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				28.495.000 .000,00		23.500.000 .000,00		89.253.000 .000,00		90.695.000 .000,00		90.695.000 .000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	63	110	28.495.000 .000,00	30	23.500.000 .000,00	75	89.253.000 .000,00	220	90.695.000 .000,00	220	90.695.000 .000,00	
1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa				600.000.00 0,00		525.000.00 0,00		525.000.00 0,00		525.000.00 0,00		525.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	0	20	600.000.00 0,00	20	525.000.00 0,00	20	525.000.00 0,00	20	525.000.00 0,00	20	525.000.00 0,00	
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				4.200.000. 000,00		3.400.000. 000,00		3.400.000. 000,00		3.400.000. 000,00		3.400.000. 000,00	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	65	5	4.200.000. 000,00	4	3.400.000. 000,00	4	3.400.000. 000,00	4	3.400.000. 000,00	4	3.400.000. 000,00	
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0,00		700.000.00 0,00		700.000.00 0,00		700.000.00 0,00		700.000.00 0,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0		0,00	1	700.000.00 0,00	1	700.000.00 0,00	1	700.000.00 0,00	1	700.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.03.2.01.0030 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	0		0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				9.450.000. 000,00		9.450.000. 000,00		9.450.000. 000,00		9.450.000. 000,00		9.450.000. 000,00	
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang di optimalisasi (Unit)	0	5	9.450.000. 000,00	5	9.450.000. 000,00	5	9.450.000. 000,00	5	9.450.000. 000,00	5	9.450.000. 000,00	
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				73.608.000 .000,00		8.500.000. 000,00		8.500.000. 000,00		8.500.000. 000,00		8.500.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.717	1.714	73.608.000.000,00	1.000	8.500.000.000,00	1.000	8.500.000.000,00	1.000	8.500.000.000,00	1.000	8.500.000.000,00	
1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				3.275.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang di optimalisasi (Unit)	7.221	91	3.275.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)		40	300.000.00 0,00	23	300.000.00 0,00	22	300.000.00 0,00	23	300.000.00 0,00	23	300.000.00 0,00	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				77.427.500 .000,00		2.130.000. 000,00		29.140.009 .000,00		28.532.109 .000,00		28.532.109 .000,00	
Meningkatnya rumah yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	89,10	98,9 4	77.427.500 .000,00	99,1 6	2.130.000. 000,00	99,3 0	29.140.009 .000,00	99,3 8	28.532.109 .000,00	99,4 0	28.532.109 .000,00	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				77.427.500 .000,00		2.130.000. 000,00		29.140.009 .000,00		28.532.109 .000,00		28.532.109 .000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya rumah dengan akses unit pengolahan setempat/terpusat	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	42	75	77.427.500 .000,00		2.130.000. 000,00	150	29.140.009 .000,00	150	28.532.109 .000,00	150	28.532.109 .000,00	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	14	17		150		250		250		250		
	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang di optimalisasi (Unit)		1						1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar <i>individual</i> dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)		45		32		182		199		199		
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)		111		111		225		300		300		
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)						2		3		3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang di optimalisasi (Unit)				1		2		2		2		
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1					1		1		1		
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)		20				20		20		20		
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (M ³ /Hari)						1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)						1						
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M ³ /Hari)						2		2		2		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)						2						
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				600.000.00 0,00		0,00		0,00		600.000.00 0,00		600.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang di optimalisasi (Unit)		1	600.000.00 0,00		0,00		0,00	1	600.000.00 0,00	1	600.000.00 0,00	
1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0,00		0,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00	
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)			0,00		0,00	1	1.000.000. 000,00	1	1.000.000. 000,00	1	1.000.000. 000,00	
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				0,00		0,00		2.000.000. 000,00		0,00		0,00	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)			0,00		0,00	1	2.000.000. 000,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				0,00		0,00		1.000.000. 000,00		0,00		0,00	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)			0,00		0,00	2	1.000.000. 000,00		0,00		0,00	
1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				0,00		180.000.00 0,00		800.000.00 0,00		800.000.00 0,00		800.000.00 0,00	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang di optimalisasi (Unit)			0,00	1	180.000.00 0,00	2	800.000.00 0,00	2	800.000.00 0,00	2	800.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				0,00		0,00		690.000.00 0,00		690.000.00 0,00		690.000.00 0,00	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (MÃ³/Hari)			0,00		0,00	2	690.000.00 0,00	2	690.000.00 0,00	2	690.000.00 0,00	
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		225.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00	
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)		111	250.000.00 0,00	111	250.000.00 0,00	225	225.000.00 0,00	300	300.000.00 0,00	300	300.000.00 0,00	
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				11.000.000 .000,00		0,00		11.000.000 .000,00		11.000.000 .000,00		11.000.000 .000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)		20	11.000.000 .000,00		0,00	20	11.000.000 .000,00	20	11.000.000 .000,00	20	11.000.000 .000,00	
1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				0,00		0,00		2.000.000. 000,00		3.000.000. 000,00		3.000.000. 000,00	
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00	2	2.000.000. 000,00	3	3.000.000. 000,00	3	3.000.000. 000,00	
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0,00		0,00		1.500.000. 000,00		1.500.000. 000,00		1.500.000. 000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		0,00		0,00	1	1.500.000. 000,00	1	1.500.000. 000,00	1	1.500.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				150.000.00 0,00		0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	42	75	150.000.00 0,00		0,00	150	300.000.00 0,00	150	300.000.00 0,00	150	300.000.00 0,00	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				63.727.500 .000,00		1.550.000. 000,00		8.375.009. 000,00		9.092.109. 000,00		9.092.109. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar <i>individual</i> dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)		45	63.727.500 .000,00	32	1.550.000. 000,00	182	8.375.009. 000,00	199	9.092.109. 000,00	199	9.092.109. 000,00	
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1.700.000. 000,00		150.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	14	17	1.700.000. 000,00	150	150.000.00 0,00	250	250.000.00 0,00	250	250.000.00 0,00	250	250.000.00 0,00	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				173.620.18 5.757,00		452.217.40 1.870,72		505.114.95 5.264,34		507.459.61 0.021,09		496.927.04 5.003,45	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.882.935 .757,00		36.546.331 .853,00		36.896.331 .853,00		38.396.331 .853,00		38.396.331 .853,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	70,12	70,5 0	32.882.935 .757,00	71	36.546.331 .853,00	71,5 0	36.896.331 .853,00	72	38.396.331 .853,00	72,5 0	38.396.331 .853,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				475.000.00 0,00		600.000.00 0,00		600.000.00 0,00		600.000.00 0,00		600.000.00 0,00	
Terlaksananya penyusunan dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	65	475.000.00 0,00	65	600.000.00 0,00	65	600.000.00 0,00	65	600.000.00 0,00	65	600.000.00 0,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.00 0,00		150.000.00 0,00		150.000.00 0,00		150.000.00 0,00		150.000.00 0,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2	150.000.00 0,00	2	150.000.00 0,00	2	150.000.00 0,00	2	150.000.00 0,00	2	150.000.00 0,00	
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000 ,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000 ,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.000.000 ,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	75.000.000 ,00	3	100.000.00 0,00	3	100.000.00 0,00	3	100.000.00 0,00	3	100.000.00 0,00	
1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000 ,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Terselenggaranya Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000 ,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	65	100.000.00 0,00	65	100.000.00 0,00	65	100.000.00 0,00	65	100.000.00 0,00	65	100.000.00 0,00	
1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.796.331 .853,00		21.846.331 .853,00		21.846.331 .853,00		21.846.331 .853,00		21.846.331 .853,00	
Terlaksananya penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	6	21.796.331 .853,00	6	21.846.331 .853,00	6	21.846.331 .853,00	6	21.846.331 .853,00	6	21.846.331 .853,00	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.905	2.11 4		2.67 4		2.67 4		2.67 4		2.67 4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.371.331 .853,00		21.371.331 .853,00		21.371.331 .853,00		21.371.331 .853,00		21.371.331 .853,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.905	2.11 4	21.371.331 .853,00	2.67 4	21.371.331 .853,00	2.67 4	21.371.331 .853,00	2.67 4	21.371.331 .853,00	2.67 4	21.371.331 .853,00	
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	
1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				25.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	6	25.000.000 ,00	6	50.000.000 ,00	6	50.000.000 ,00	6	50.000.000 ,00	6	50.000.000 ,00	
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				350.000.00 0,00		350.000.00 0,00		350.000.00 0,00		350.000.00 0,00		350.000.00 0,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	350.000.00 0,00	12	350.000.00 0,00	12	350.000.00 0,00	12	350.000.00 0,00	12	350.000.00 0,00	
1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			0,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00	
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				80.000.000 ,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00	
Terlaksananya penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		1	80.000.000 ,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
1.04.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000 ,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		1	30.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00		1.100.000.000,00		600.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
Terlaksananya penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			150.000.000,00	15	1.100.000.000,00	15	600.000.000,00	15	1.100.000.000,00	15	1.100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1		2		2		2		2		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				15		15		15		15		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				1				1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		15		25		25		25		25		
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		500.000.00 0,00		0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0,00	1	500.000.00 0,00		0,00	1	500.000.00 0,00	1	500.000.00 0,00	
1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1	25.000.000 ,00	2	50.000.000 ,00	2	50.000.000 ,00	2	50.000.000 ,00	2	50.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			0,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	
1.04.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	25.000.000 ,00	2	50.000.000 ,00	2	50.000.000 ,00	2	50.000.000 ,00	2	50.000.000 ,00	
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		15	100.000.00 0,00	25	250.000.00 0,00	25	250.000.00 0,00	25	250.000.00 0,00	25	250.000.00 0,00	
1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00	15	100.000.00 0,00	15	100.000.00 0,00	15	100.000.00 0,00	15	100.000.00 0,00	
1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00	15	100.000.00 0,00	15	100.000.00 0,00	15	100.000.00 0,00	15	100.000.00 0,00	
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				975.000.00 0,00		3.100.000. 000,00		3.100.000. 000,00		3.100.000. 000,00		3.100.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	975.000.00 0,00	1	3.100.000. 000,00	1	3.100.000. 000,00	1	3.100.000. 000,00	1	3.100.000. 000,00	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	568	250		750		750		750		750		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	357	125		250		250		250		250		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		650.000.00 0,00		650.000.00 0,00		650.000.00 0,00		650.000.00 0,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0,00	1	650.000.00 0,00	1	650.000.00 0,00	1	650.000.00 0,00	1	650.000.00 0,00	
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	200.000.00 0,00	2	500.000.00 0,00	2	500.000.00 0,00	2	500.000.00 0,00	2	500.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	200.000.00 0,00	2	500.000.00 0,00	2	500.000.00 0,00	2	500.000.00 0,00	2	500.000.00 0,00	
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				75.000.000 ,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	75.000.000 ,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.00 0,00		800.000.00 0,00		800.000.00 0,00		800.000.00 0,00		800.000.00 0,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	357	125	350.000.00 0,00	250	800.000.00 0,00	250	800.000.00 0,00	250	800.000.00 0,00	250	800.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				150.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	568	250	150.000.00 0,00	750	500.000.00 0,00	750	500.000.00 0,00	750	500.000.00 0,00	750	500.000.00 0,00	
1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.800.000. 000,00		700.000.00 0,00		1.000.000. 000,00		1.500.000. 000,00		1.500.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	250	6	1.800.000. 000,00	12	700.000.00 0,00	18	1.000.000. 000,00	24	1.500.000. 000,00	24	1.500.000. 000,00	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1										
1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.500.000. 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1	1.500.000. 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.00 0,00		700.000.00 0,00		1.000.000. 000,00		1.500.000. 000,00		1.500.000. 000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	250	6	300.000.00 0,00	12	700.000.00 0,00	18	1.000.000. 000,00	24	1.500.000. 000,00	24	1.500.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.506.603. 904,00		6.000.000. 000,00		6.000.000. 000,00		6.500.000. 000,00		6.500.000. 000,00	
Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.506.603. 904,00	12	6.000.000. 000,00	12	6.000.000. 000,00	12	6.500.000. 000,00	12	6.500.000. 000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.500.000. 000,00		3.000.000. 000,00		3.000.000. 000,00		3.500.000. 000,00		3.500.000. 000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.500.000. 000,00	12	3.000.000. 000,00	12	3.000.000. 000,00	12	3.500.000. 000,00	12	3.500.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.006.603. 904,00		3.000.000. 000,00		3.000.000. 000,00		3.000.000. 000,00		3.000.000. 000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.006.603. 904,00	12	3.000.000. 000,00	12	3.000.000. 000,00	12	3.000.000. 000,00	12	3.000.000. 000,00	
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.100.000. 000,00		3.000.000. 000,00		3.550.000. 000,00		3.550.000. 000,00		3.550.000. 000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		30	3.100.000. 000,00	60	3.000.000. 000,00	60	3.550.000. 000,00	60	3.550.000. 000,00	60	3.550.000. 000,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				6		6		6		6		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	55	60		60		60		60		60		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2		
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.900.000. 000,00		1.900.000. 000,00		1.900.000. 000,00		1.900.000. 000,00		1.900.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	55	60	1.900.000. 000,00	60	1.900.000. 000,00	60	1.900.000. 000,00	60	1.900.000. 000,00	60	1.900.000. 000,00	
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			0,00	6	200.000.00 0,00	6	200.000.00 0,00	6	200.000.00 0,00	6	200.000.00 0,00	
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		30	100.000.00 0,00	60	200.000.00 0,00	60	200.000.00 0,00	60	200.000.00 0,00	60	200.000.00 0,00	
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000. 000,00		500.000.00 0,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	2	2	1.000.000. 000,00	2	500.000.00 0,00	2	1.000.000. 000,00	2	1.000.000. 000,00	2	1.000.000. 000,00	
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.00 0,00		200.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	1	1	100.000.00 0,00	1	200.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				43.201.000 .000,00		71.595.000 .000,00		46.795.000 .000,00		46.395.000 .000,00		46.395.000 .000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	43.201.000 .000,00	100	71.595.000 .000,00	100	46.795.000 .000,00	100	46.395.000 .000,00	100	46.395.000 .000,00	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni (%)	100	100		100		100		100		100		
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.850.000. 000,00		2.200.000. 000,00		2.200.000. 000,00		1.800.000. 000,00		1.800.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program kabupaten	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1	1.850.000. 000,00	1	2.200.000. 000,00	1	2.200.000. 000,00	1	1.800.000. 000,00	1	1.800.000. 000,00	
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	5	6		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)		3		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)		1		1		1		1		1		
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				500.000.00 0,00		550.000.00 0,00		550.000.00 0,00		550.000.00 0,00		550.000.00 0,00	
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	5	6	500.000.00 0,00	5	550.000.00 0,00	5	550.000.00 0,00	5	550.000.00 0,00	5	550.000.00 0,00	
1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				200.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1	200.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				50.000.000 ,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)		1	50.000.000 ,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	500.000.00 0,00	1	500.000.00 0,00	1	500.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				150.000.00 0,00		550.000.00 0,00		550.000.00 0,00		550.000.00 0,00		550.000.00 0,00	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1	150.000.00 0,00	1	550.000.00 0,00	1	550.000.00 0,00	1	550.000.00 0,00	1	550.000.00 0,00	
1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				300.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)		3	300.000.00 0,00	2	250.000.00 0,00	2	250.000.00 0,00	2	250.000.00 0,00	2	250.000.00 0,00	
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)		1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	1	50.000.000 ,00	
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				50.000.000 ,00		570.000.00 0,00		570.000.00 0,00		570.000.00 0,00		570.000.00 0,00	
Terlaksananya sosialisasi dan persiapaasn penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program kabupaten	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	40		50.000.000 ,00	1	570.000.00 0,00	1	570.000.00 0,00	1	570.000.00 0,00	1	570.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Orang/Sukarelaw an yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)				1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)				20		20		20		20		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)				20		20		20		20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)				30		30		30		30		
	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)			0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	40		0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan				50.000.000 ,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1	1	50.000.000 ,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0,00		70.000.000 ,00		70.000.000 ,00		70.000.000 ,00		70.000.000 ,00	
Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)			0,00	30	70.000.000 ,00	30	70.000.000 ,00	30	70.000.000 ,00	30	70.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)			0,00	20	100.000.00 0,00	20	100.000.00 0,00	20	100.000.00 0,00	20	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)			0,00	20	100.000.00 0,00	20	100.000.00 0,00	20	100.000.00 0,00	20	100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				41.201.000 .000,00		67.605.000 .000,00		42.705.000 .000,00		42.705.000 .000,00		42.705.000 .000,00	
Terbangunnya/Ter- rehabilitasinya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	25	41.201.000 .000,00	28	67.605.000 .000,00	8	42.705.000 .000,00	8	42.705.000 .000,00	8	42.705.000 .000,00	
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)				10		10		10		10		
	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		12		10		10		10		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	2	94		10		10		10		10		
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Ter- rehabilitasi (Unit Rumah)		5		5		5		5		5		
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	94	69		70		40		40		40		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				275.000.00 0,00		350.000.00 0,00		350.000.00 0,00		350.000.00 0,00		350.000.00 0,00	
Ter-rehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Ter- rehabilitasi (Unit Rumah)		5	275.000.00 0,00	5	350.000.00 0,00	5	350.000.00 0,00	5	350.000.00 0,00	5	350.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				0,00		570.000.00 0,00		570.000.00 0,00		570.000.00 0,00		570.000.00 0,00	
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	0,00	2	570.000.00 0,00	2	570.000.00 0,00	2	570.000.00 0,00	2	570.000.00 0,00	
1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.000. 000,00		1.100.000. 000,00		1.100.000. 000,00		1.100.000. 000,00		1.100.000. 000,00	
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan dilingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	2	94	5.000.000. 000,00	10	1.100.000. 000,00	10	1.100.000. 000,00	10	1.100.000. 000,00	10	1.100.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		12	100.000.00 0,00	10	100.000.00 0,00	10	100.000.00 0,00	10	100.000.00 0,00	10	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)			0,00	10	100.000.00 0,00	10	100.000.00 0,00	10	100.000.00 0,00	10	100.000.00 0,00	
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				6.250.000. 000,00		7.105.000. 000,00		2.155.000. 000,00		2.155.000. 000,00		2.155.000. 000,00	
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	25	6.250.000. 000,00	28	7.105.000. 000,00	8	2.155.000. 000,00	8	2.155.000. 000,00	8	2.155.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				29.576.000 .000,00		58.280.000 .000,00		38.330.000 .000,00		38.330.000 .000,00		38.330.000 .000,00	
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Proqram Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	94	69	29.576.000 .000,00	70	58.280.000 .000,00	40	38.330.000 .000,00	40	38.330.000 .000,00	40	38.330.000 .000,00	
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100.000.00 0,00		1.120.000. 000,00		1.220.000. 000,00		1.220.000. 000,00		1.220.000. 000,00	
Terlaksananya koordinasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)			100.000.00 0,00	1	1.120.000. 000,00	1	1.220.000. 000,00	1	1.220.000. 000,00	1	1.220.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpe- li hara (Sistem Informasi)				1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)				1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4	1		1		1		1		1		
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				100.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelak u Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4	1	100.000.00 0,00	1	300.000.00 0,00	1	300.000.00 0,00	1	300.000.00 0,00	1	300.000.00 0,00	
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				0,00		500.000.00 0,00		600.000.00 0,00		600.000.00 0,00		600.000.00 0,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)			0,00	1	500.000.00 0,00	1	600.000.00 0,00	1	600.000.00 0,00	1	600.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)			0,00	1	250.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	
1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengemba ngan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				0,00		70.000.000 ,00		70.000.000 ,00		70.000.000 ,00		70.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terbentuknya/terpelihara nya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpeli hara (Sistem Informasi)			0,00	1	70.000.000 ,00	1	70.000.000 ,00	1	70.000.000 ,00	1	70.000.000 ,00	
1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Tersedianya sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)			0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)			0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				4.875.000. 000,00		4.850.000. 000,00		4.600.000. 000,00		4.600.000. 000,00		4.600.000. 000,00	
Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang tertangani	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	77,42	43,6 6	4.875.000. 000,00	60,5 6	4.850.000. 000,00	77,4 6	4.600.000. 000,00	88,7 3	4.600.000. 000,00	100	4.600.000. 000,00	
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				0,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00		50.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya izin terkait pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	0		0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	0		0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				600.000.00 0,00		950.000.00 0,00		700.000.00 0,00		700.000.00 0,00		700.000.00 0,00	
Tersedianya dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	3	1	600.000.00 0,00	2	950.000.00 0,00	2	700.000.00 0,00	2	700.000.00 0,00	2	700.000.00 0,00	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi (Dokumen)	1	1		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Lega lisasi Kebijakan Bidang PKP				250.000.00 0,00		500.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00	
Tersusun/Tereview/Terleg alisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	250.000.00 0,00	2	500.000.00 0,00	2	250.000.00 0,00	2	250.000.00 0,00	2	250.000.00 0,00	
1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				100.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00	
Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	3	1	100.000.00 0,00	2	200.000.00 0,00	2	200.000.00 0,00	2	200.000.00 0,00	2	200.000.00 0,00	
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)		1	250.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	1	250.000.00 0,00	
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				4.275.000. 000,00		3.850.000. 000,00		3.850.000. 000,00		3.850.000. 000,00		3.850.000. 000,00	
Meningkatnya luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)		20	4.275.000. 000,00		3.850.000. 000,00		3.850.000. 000,00		3.850.000. 000,00		3.850.000. 000,00	
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	5	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)		1										
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	29	20		20		20		20		20		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh (Laporan)		1		1		1		1		1		
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				1.250.000. 000,00		1.250.000. 000,00		1.250.000. 000,00		1.250.000. 000,00		1.250.000. 000,00	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	29	20	1.250.000. 000,00	20	1.250.000. 000,00	20	1.250.000. 000,00	20	1.250.000. 000,00	20	1.250.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				100.000.00 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)		1	100.000.00 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				75.000.000 ,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh (Laporan)		1	75.000.000 ,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.350.000. 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)		20	1.350.000. 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				1.500.000. 000,00		2.500.000. 000,00		2.500.000. 000,00		2.500.000. 000,00		2.500.000. 000,00	
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	5	1	1.500.000. 000,00	1	2.500.000. 000,00	1	2.500.000. 000,00	1	2.500.000. 000,00	1	2.500.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				40.300.000 .000,00		50.667.500 .000,00		50.667.500 .000,00		50.667.500 .000,00		50.667.500 .000,00	
Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani (%)	43,56	53,9 0	40.300.000 .000,00	65,4 3	50.667.500 .000,00	76,9 5	50.667.500 .000,00	88,4 8	50.667.500 .000,00	100	50.667.500 .000,00	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				40.300.000 .000,00		50.667.500 .000,00		50.667.500 .000,00		50.667.500 .000,00		50.667.500 .000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tercegahnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.775	350	40.300.000 .000,00	450	50.667.500 .000,00	450	50.667.500 .000,00	450	50.667.500 .000,00	450	50.667.500 .000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)		150		150		150		150		150		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	29	150		150		150		150		150		
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)		30		30		30		30		30		
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				35.850.000 .000,00		45.000.000 .000,00		45.000.000 .000,00		45.000.000 .000,00		45.000.000 .000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.775	350	35.850.000.000,00	450	45.000.000.000,00	450	45.000.000.000,00	450	45.000.000.000,00	450	45.000.000.000,00	
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				4.250.000.000,00		5.467.500.000,00		5.467.500.000,00		5.467.500.000,00		5.467.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)		30	4.250.000.000,00	30	5.467.500.000,00	30	5.467.500.000,00	30	5.467.500.000,00	30	5.467.500.000,00	
1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	29	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	
1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)		150	100.000.00 0,00	150	100.000.00 0,00	150	100.000.00 0,00	150	100.000.00 0,00	150	100.000.00 0,00	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				52.286.250 .000,00		287.558.57 0.017,72		365.156.12 3.411,34		366.400.77 8.168,09		355.868.21 3.150,45	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (%)	16,03	46,4 1	52.286.250 .000,00	54,8 5	287.558.57 0.017,72	63,2 9	365.156.12 3.411,34	71,7 3	366.400.77 8.168,09	80,1 7	355.868.21 3.150,45	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				52.286.250 .000,00		287.558.57 0.017,72		365.156.12 3.411,34		366.400.77 8.168,09		355.868.21 3.150,45	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	2	52.286.250 .000,00	2	287.558.57 0.017,72	2	365.156.12 3.411,34	2	366.400.77 8.168,09	2	355.868.21 3.150,45	
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)		122		1.00 0		1.00 0		1.00 0		1.00 0		
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)				67		67		67		67		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	2	8		6		6		4		4		
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1.050.000.000,00		3.130.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	2	1.050.000.000,00	2	3.130.000.000,00	2	850.000.000,00	2	850.000.000,00	2	850.000.000,00	
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)		1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				200.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00	
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	2	8	200.000.00 0,00	6	250.000.00 0,00	6	250.000.00 0,00	4	250.000.00 0,00	4	250.000.00 0,00	
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				0,00		241.578.57 0.017,72		321.456.12 3.411,34		322.700.77 8.168,09		312.168.21 3.150,45	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)			0,00	67	241.578.57 0.017,72	67	321.456.12 3.411,34	67	322.700.77 8.168,09	67	312.168.21 3.150,45	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				50.936.250 .000,00		42.500.000 .000,00		42.500.000 .000,00		42.500.000 .000,00		42.500.000 .000,00	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)		122	50.936.250 .000,00	1.00 0	42.500.000 .000,00	1.00 0	42.500.000 .000,00	1.00 0	42.500.000 .000,00	1.00 0	42.500.000 .000,00	
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				75.000.000 ,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	0	11,7 6	75.000.000 ,00	17,6 5	1.000.000. 000,00	23,5 3	1.000.000. 000,00	29,4 1	1.000.000. 000,00	35,2 9	1.000.000. 000,00	
1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				75.000.000 ,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)		1	75.000.000 ,00	1	1.000.000. 000,00	1	1.000.000. 000,00	1	1.000.000. 000,00	1	1.000.000. 000,00	
1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				75.000.000 ,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00		1.000.000. 000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)		1	75.000.000 ,00	1	1.000.000. 000,00	1	1.000.000. 000,00	1	1.000.000. 000,00	1	1.000.000. 000,00	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Sub Kegiatan merupakan unit operasional teknis yang secara eksplisit dirancang untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sub Kegiatan ini menjadi bagian integral dari program dan kegiatan yang ditandai sebagai *flagship* atau prioritas strategis perangkat daerah, sehingga memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam konteks Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sub Kegiatan prioritas diarahkan untuk mendukung program unggulan kepala daerah serta urusan wajib pelayanan dasar, khususnya penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dasar permukiman. Sub Kegiatan tersebut meliputi langkah-langkah operasional seperti penyusunan dokumen teknis, pelaksanaan pembangunan fisik, pendampingan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang terukur.

Setiap Sub Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, target capaian tahunan maupun periode, serta pagu indikatif anggaran yang realistis. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan Sub Kegiatan tidak hanya menghasilkan keluaran (*output*) yang terukur, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, Sub Kegiatan prioritas menjadi wujud konkret komitmen perangkat daerah dalam mendukung visi, misi, dan program unggulan kepala daerah, sekaligus memperkuat peran daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar.

Tabel 4.4 Daftar Program Prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.1.03.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	SPM
			1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	SPM
			1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPM
			1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPM
			1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	SPM, Program Permukiman Idaman Terbaik
			1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPM
			1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPM
			1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPM, Program Permukiman Idaman Terbaik
			1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	SPM
			1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya rumah yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	SPM
			1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	SPM
			1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SPM
			1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SPM
			1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	SPM
			1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	SPM
			1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	SPM
			1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan	SPM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SPM
			1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	SPM
			1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SPM
3.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	SPM
			1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data	SPM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
			1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	SPM
			1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	SPM
			1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	SPM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	SPM
			1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	SPM
			1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	SPM
			1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	SPM
			1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian	SPM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	SPM
			1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	SPM
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	SPM, Program Permukiman Idaman Terbaik
			1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi	SPM, Program Permukiman

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Idaman Terbaik
			1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	SPM, Program Permukiman Idaman Terbaik
4.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang tertangani	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
			1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Program Permukiman Idaman Terbaik
			1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Program Permukiman Idaman Terbaik
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Program Etam Sejahtera
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
5.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan	Program Etam Sejahtera

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
6.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Program Permukiman Idaman Terbaik
			1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Program Permukiman Idaman Terbaik
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Program Permukiman Idaman Terbaik

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.	1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
			1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran strategis yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam dokumen Renstra 2025–2029. IKU dirancang untuk mengukur hasil akhir (*outcome*) dari pelaksanaan program secara agregat, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sebagai instrumen evaluasi jangka menengah, IKU menjadi dasar dalam menilai konsistensi, efektivitas, dan relevansi pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. IKU juga berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja, karena terintegrasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memastikan keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja.

Dalam periode 2025–2029, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan melalui IKU yang mencerminkan *outcome* strategis, antara lain:

- Peningkatan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni;
- Penurunan luas kawasan kumuh yang tertangani sesuai target RPJMD;
- Peningkatan persentase penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan aman;
- Peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman sesuai standar pelayanan minimal.

Dengan adanya IKU yang jelas, terukur, dan terintegrasi, perangkat daerah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. IKU menjadi kompas strategis yang mengarahkan pelaksanaan Renstra, sekaligus menjamin akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	2,12	2,29	2,55	2,81	3,06	3,32	3,58	
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak**	%	89,10	98,91	98,94	99,16	99,30	99,38	99,40	
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,34	1,55	1,64	2,58	3,64	4,82	6,02	
4	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan**	%	80,20	82,36	84,78	87,28	89,84	92,49	96,11	
5	Rasio Permukiman Layak Huni	%	97,87	98,81	98,78	98,77	98,76	98,74	98,74	

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran terukur yang mencerminkan keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari berbagai dimensi seperti kesejahteraan, pelayanan publik, pemerataan, dan daya saing, serta menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fungsi Indikator Kinerja Daerah (IKD) antara lain adalah

1. Alat Pengukur Keberhasilan: Menilai sejauh mana janji politik dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tercapai
2. Transparansi & Akuntabilitas: Sebagai bahan penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) kepada Pemerintah Pusat
3. Dasar Pengalokasian Anggaran: Daerah dengan kinerja baik seringkali mendapatkan insentif melalui Dana Insentif Daerah (DID)

Dalam periode 2025-2029 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Aspek Geografi dan Demografi
 - a. Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)
 - b. Cakupan layanan air minum layak perpipaan
2. Aspek Daya Saing Daerah
 - a. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator teknis yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah. IKK disusun lebih rinci dan operasional dibandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga mampu memberikan gambaran teknis mengenai keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah.

IKK berfungsi sebagai instrumen penilaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi referensi utama dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah. Dengan adanya IKK, setiap perangkat daerah dapat memastikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan sesuai mandat, terukur, dan akuntabel.

Dalam periode perencanaan 2025–2029, target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan melalui IKK yang mencerminkan capaian teknis, antara lain:

- Persentase rumah tidak layak huni (RTLH) yang tertangani melalui program rehabilitasi.
- Persentase kawasan kumuh yang ditangani sesuai target tahunan.

- Persentase masyarakat yang memperoleh akses terhadap sistem penyediaan air minum non-perpipaan.
- Persentase permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dasar sesuai standar pelayanan minimal.
- Jumlah dokumen teknis perencanaan permukiman yang disusun dan dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan indikator yang lebih rinci dan teknis, IKK memastikan bahwa setiap langkah operasional perangkat daerah dapat diukur secara objektif, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra, memperkuat akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja (IKK)	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	Persen	77,42	90,32	43,66	60,56	77,46	88,73	100,00	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	Persen	43,56	44,78	53,90	65,43	76,95	88,48	100,00	
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	16,03	37,97	46,41	54,85	63,29	71,73	80,17	

No	Indikator Kinerja (IKK)	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten	Persen	80,20	82,36	84,78	87,28	89,84	92,49	96,11	
7	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	89,10	98,91	98,94	99,16	99,30	99,38	99,40	

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan dasar permukiman yang layak, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman selama periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat kualitas lingkungan permukiman, meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta memastikan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas dasar yang memadai. Renstra ini menegaskan bahwa pembangunan permukiman tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan tata kelola, kolaborasi lintas-sektor, dan pemanfaatan data spasial sebagai dasar pengambilan keputusan.

Secara substansial, dokumen ini menempatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *enabler* pembangunan daerah, di mana penyediaan prasarana dasar permukiman menjadi fondasi bagi OPD lain dalam melaksanakan program kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan permukiman memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian target pembangunan daerah.

2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra ini berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan nasional dan daerah terkait perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, dan penataan ruang.
- Integrasi perencanaan lintas-OPD, terutama pada kawasan prioritas, kawasan kumuh, dan wilayah yang membutuhkan intervensi terpadu.

- Pemanfaatan data dan informasi yang akurat, termasuk baseline indikator, peta tematik, dan hasil kajian teknis sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah lain, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, untuk memperkuat kapasitas, inovasi, dan pendanaan pembangunan permukiman.
- Pendekatan partisipatif, yang memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan.

3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai sesuai target. Mekanisme pengendalian dan evaluasi meliputi:

- Pemantauan berkala terhadap capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta kondisi lapangan pada kawasan prioritas.
- Evaluasi tahunan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan dokumen evaluasi Renja, sebagai dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya.
- Evaluasi tengah periode (mid-term review) untuk menilai relevansi, efektivitas, dan konsistensi Renstra dengan dinamika kebijakan nasional maupun daerah.
- Evaluasi akhir periode untuk mengukur tingkat keberhasilan keseluruhan Renstra dan menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya.
- Penguatan sistem pengendalian internal, termasuk tata kelola, manajemen risiko, dan mekanisme pelaporan kinerja.

Melalui pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan bahwa pembangunan permukiman berjalan sesuai arah kebijakan, responsif terhadap perubahan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2026

